

واقع إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا

أطروحة علمية

مقدمة لاستيفاء بعض شروط الحصول

على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي

بكلية الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية



إعداد

عبد المنعم سالم الدالي

رقم القيد: F02314035

كلية الدراسات العليا

جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية

2018

إقرار الطالب

الموقع أدناه وبياناتي كالاتي:

الاسم: عبد المنعم سالم الدالي

رقم القيد: F02314035

المرحلة: الدكتوراة

الجهة: كلية الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية بسورابايا

أقر بأن هذه الرسالة بكافة أجزاءها حضرتها من بحثي وكتبتها بنفسي إلا مواضع منقولة

عزوت إلى مصادرها.

هذا، وقد حرر هذا الإقرار بناء على رغبتي الخاصة ولا يجبرني أحد على ذلك.

سورابايا 23 / 11 / 2018م

الطالب المقر



عبد المنعم سالم الدالي

F02314035

موافقة المشرفين

تمت الموافقة من طرف المشرفين على هذه الأطروحة التي قدمها الطالب: عبد المنعم سالم الدالي في جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا .

المشرف

(التوقيع)



الأستاذ الدكتور: فيصل الحق

المشرف

(التوقيع)



الدكتور: أحمد إمام الماوردي

موافقة لجنة المناقشة

تمت مناقشة هذه الأطروحة المقدمة من الطالب: عبد المنعم سالم الدالي في المناقشة المفتوحة في 28

نوفمبر 2018 أمام لجنة المناقشة التي تتكون من:

1- د. أحمد نور فؤاد (رئيساً للجنة ومناقشاً)

2- د. حميس شفيق (سكرتير اللجنة ومناقشاً)

3- أ.د فيصل الحق (مشرفاً ومناقشاً)

4- د. أحمد إمام الماوردي (مشرفاً ومناقشاً)

5- أ.د سيد عقيل حسين المنور (مناقشاً)

6- د. محمد عارف (مناقشاً)



اعتماد عميد الدراسات العليا

بروفسور سودي



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDULMONEM SALEM I ALDALI
NIM : F02314035
Fakultas/Jurusan : Pacasarjana / ekonomi syariah (S3)
E-mail address : aldali1973@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

واقع ادارة واستثمار الاوقاف في ليبيا

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26/12/2018

Penulis

Abdulmonem slaem i aldali

(
nama terang dan tanda tangan
)

ABSTRAK

Wakaf di Libya dengan segala permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan investasinya belum banyak dikaji dan dianalisa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) bagaimana realitas manajemen dan investasi wakaf di Libya?, (2) mengapa wakaf di Libya belum memainkan perannya dalam mewujudkan kemaslahatan wakaf dan pemberi wakaf (wakif)?, (3) bagaimana pengefektifan peran manajemen dan investasi wakaf di Libya agar berjalan dengan lebih baik?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif model studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Libya memiliki kekayaan wakaf yang dikelola oleh badan khusus milik negara. Seiring dengan perjalanan waktu, badan ini secara umum memberikan pengaruh dan mengawal pengembangan perwakafan dengan menetapkan beberapa undang-undang dan keputusan; di antaranya adalah undang-undang nomor 124 tahun 1972 dan undang-undang nomor 21 tahun 2010.

Wakaf di Libya dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf *khairy* (untuk kepentingan umum) dan wakaf *dzurri* (untuk kerabat/keluarga), meskipun wakaf *dzurri* ini masih terbilang abstrak dan mengarah pada wakaf *khairy*. Ada bermacam-macam bentuk dan bidang perwakafan, umumnya berada di masjid dan sekolah Alquran. Adapun wakaf di Libya masih kalah dengan transaksi sewa menyewa. Wakaf secara umum memiliki berbagai problem dan kendala kebijakan dan pengelolaan. Kendala kebijakan yang paling utama adalah kendali negara terhadap urusan wakaf dan stagnansi undang-undang yang diterbitkan oleh negara. Adapun kendala pengelolaan yang paling utama adalah tidak adanya struktur organisasi dan jabatan fungsional yang mengawal pengurus badan yang baru tahun 2016, begitu juga kendala sistem terpusat. Ada banyak pula problem dan kendala khusus terkait investasi wakaf di Libya yang pada umumnya berkaitan dengan pihak yang mengambil manfaat dan pengelola wakaf tersebut seperti upah minimum regional. Adapun kendala investasi wakaf terbagi menjadi kendala kebijakan, pengelolaan, konstitusional, lingkungan yang berkaitan dengan budaya masyarakat, dan kendala yang berkaitan dengan bentuk investasi.

Wakaf di Libya memiliki batasan-batasan tertentu, utamanya adalah batasan kebijakan melihat pada peran penting negara terhadap wakaf yang secara umum tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada batasan konstitusional yang merupakan alat utama negara dalam menjalankan dan mengelola wakaf. Seharusnya negara mendukung perwakafan akan tetapi berjalan seiring dengan arah politik negara di samping itu tidak ada undang-undang yang mendukung investasi wakaf. Ada pula batasan manajerial terpusat yang diwajibkan oleh negara dalam bentuk sistem tata kelola umum beserta kelebagaannya. Begitu juga kebutuhan terhadap pelatihan dan dukungan pengalaman kepada para pegawai. Demikian juga pentingnya berbagai model pengawasan. Selanjutnya batasan sosial budaya yang berkaitan dengan manusia secara langsung (pemberi wakaf, pihak yang mendapat manfaat wakaf, investor, dan orang-orang yang melanggar ketentuan wakaf). Terakhir, ada pula batasan model investasi untuk pengembangan dengan memasukkan model-model terbaru dan tidak terbatas pada satu model saja seperti transaksi sewa menyewa.

Adapun teori yang mendasari hasil penelitian ini adalah konsep wakaf Islam yaitu bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf, investasi dan menghadapi masalah dan kendalanya tergantung pada batasan-batasan tertentu yaitu batasan kebijakan, konstitusi, pengelolaan, sosial budaya dan terakhir batasan model investasi.

ABSTRACT

Waqf in Libya with its problems, challenges and opportunities have not been well studied and analysed. Therefore, the research aims to answer the following questions: (1) how is the reality of waqf management and investment in Libya? (2) why waqf in Libya has not played its role in realizing its benefit and the waqif (founder)? (3) how the role of waqf management and investment in Libya is better and effectively implemented? The research employed a qualitative descriptive method using case study case. The data was obtained through interview and documentation.

The result shows that in Libya waqf is managed by state special institution. Over time, the institution generally influences and assists the waqf development by establishing some laws and decision such as Law number 124 of 1972 and Law number 21 of 2010.

Waqf in Libya consists of waqf *khairy* (for public interest) and waqf *dzurri* (for families). However, the latter is abstract and tends to be similar with the first one. Waqf has various forms and fields generally found in mosques and Quran schools. The total of Waqf in Libya is below the total of rent transaction due to many problems and obstacle in its policy and management. The main obstacle in its policy is state control on the waqf matter and the stagnancy of established law. The main obstacle in the management is the lack of organizational structure and functional position assisting the new management of the institution in 2016, and also the problem of centered system. The problems are generally related with the parties taking the benefit and managing the waqf such as regional minimum wages. The obstacles for waqf investment are policy problem, management, constitutional problem, environment related with the culture of the society, and investment form.

Waqf in Libya has many restrictions. The main one is policy restriction regarding with insignificant state role in waqf. The next is constitutional restriction which becomes main tool for state to run and manage waqf. The state should support waqf, but in the reality the state has no laws supporting waqf investment due to its political situation. In addition, centered managerial restriction is an obligatory in terms of general management form and institution due to state rule. Furthermore, it also deals with the need of training and experience support for the employees. Various kind of monitoring is also important. The next is sociocultural restriction directly dealing with people (waqif or waqf founder, parties who get the benefit of waqf, investor, and people who break waqf rules). The last one is investment model which for its development includes the newest models and is unlike rent transaction which deals only with one model.

The theory for the study is the concept of Islamic waqf which believes that the success of waqf management, investment and efforts to answer its problems depend on certain restrictions such as policy, constitutional, management, sociocultural and investment model.

188.....	المبحث الثاني: إدارة الأوقاف في ليبيا
209.....	المبحث الثالث: وظائف إدارة الأوقاف الحالية
223.....	المبحث الرابع: طرق استثمار الأوقاف الإسلامية في ليبيا
252.....	الفصل الثاني: المشاكل والصعوبات التي تواجه الأوقاف في ليبيا
252.....	المبحث الأول: المشاكل المرتبطة بالدولة وقوانينها
271.....	المبحث الثاني: المشاكل الإدارية المتعلقة بإدارة الأوقاف
274.....	المبحث الثالث: المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار الوقفي في ليبيا
301.....	الفصل الثالث : محددات إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا
301.....	المبحث الأول: المحدد السياسي ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا
309.....	المبحث الثاني: المحدد القانوني ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا
319.....	المبحث الثالث : المحدد الإداري ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا
327.....	المبحث الرابع: المحدد الاجتماعي والثقافي ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا
332.....	المبحث الخامس: محدد الصيغ الاستثمارية ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا
345	الباب السادس: الخاتمة
345.....	الفصل الأول: النتائج
347.....	الفصل الثاني: النظرية من النتيجة
347.....	الفصل الثالث: التوصيات

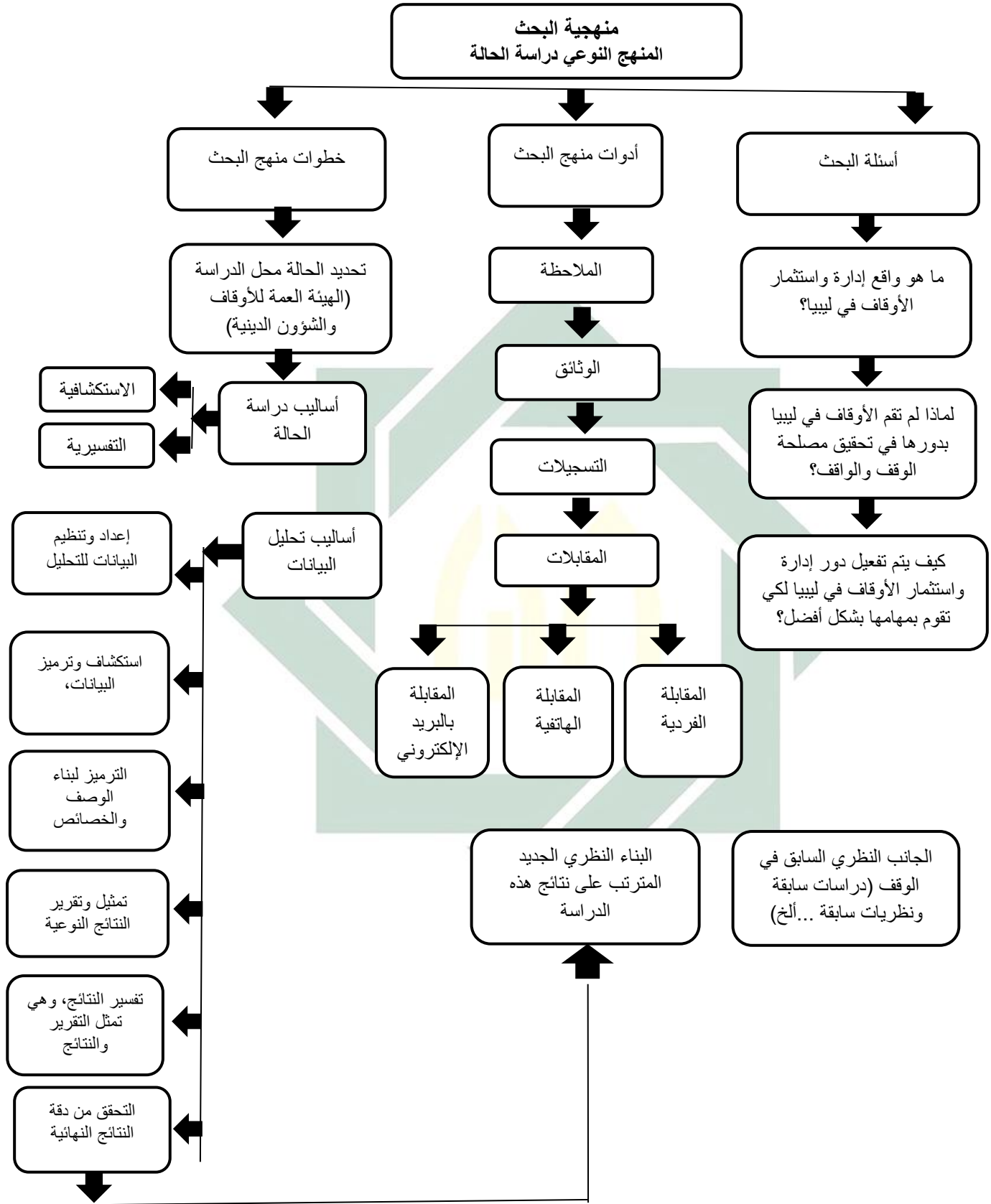
2. المقابلة بالهاتف

المقابلة عبر الهاتف هي عملية جمع البيانات باستخدام الهاتف عن طريق طرح عدد محدود من الأسئلة، والمقابلات الهاتفية مفيدة حيث قد لا يكون من الممكن جمع مجموعات من الأفراد في مقابلة أو زيارة شخص واحد مع الباحث بنفسه، فقد يكون المشاركون في إحدى الدراسات متناثرين جغرافياً وغير قادرين من الوصول إلى موقع مركزي لإجراء مقابلة، وفي هذه الحالة يمكن للباحث إجراء المقابلات الهاتفية. وتتطلب المقابلة الهاتفية أن يستخدم الباحث هاتفاً وكذلك جهاز تسجيل لتسجيل فحوى المقابلة بشكل واضح، وأحد العوائق لهذا النوع من المقابلات هو أن الباحث ليس لديه اتصال مباشر مع المشاركين، وهذا يسبب اتصالاً محدوداً قد يؤثر على قدرة الباحث على فهم تصورات الشخص المعني في هذه الظاهرة. أيضاً قد تنطوي العملية على تكاليف كبيرة لتغطية نفقات الهاتف، وباطلاع الباحث على تطبيقات هذا الأسلوب من المقابلة وجد له عدة تطبيقات منها أنه تم تطبيق هذا النوع من المقابلات في دراسة على رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكليات والجامعات في الولايات المتحدة، وأجرت مقابلات هاتفية مفتوحة لمدة 45 دقيقة لكل منها 200 رئيس منتشر في كل حرم جامعي.⁴⁷

3. المقابلة بالبريد الإلكتروني

مقابلات البريد نوع آخر من المقابلات تعتمد على مجموعة من الناس المنتشرين جغرافياً، وهذا النوع مفيد في جمع البيانات النوعية حيث أنه يتيح ميزة السرعة، وتتكون المقابلات عبر البريد الإلكتروني من جمع البيانات المفتوحة من خلال المقابلات مع الأفراد الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت للقيام بذلك، وهي تعتمد على إمكانية حصول الباحث على قوائم أو عناوين البريد الإلكتروني للأفراد المعنيين، إن هذا النوع من المقابلات يتيح الوصول السريع إلى أعداد كبيرة من الأشخاص وقاعدة بيانات نصية تفصيلية للتحليل النوعي. كما يمكن أن يعزز الحوار بين الباحث وبين المشاركين حتى يتمكن من خلال الحديث المتواصل من توسيع فهمه للموضوع أو الظاهرة التي يتم دراستها.

ومن الدراسات التي اطلع عليها الباحث التي استخدمت هذا الأسلوب أن أربعة باحثين قاموا بجمع البيانات عن طريق تطبيق هذا الأسلوب وقاموا قبل كل شيء بتحديد قائمة البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات الذين يشرفون على دورات تدريبية من أجل



شكل 1 منهجية البحث

2. أداء الحقوق للمستحقين، وعدم التأخر في دفعها إلا لضرورة، كحاجة الوقف للعمارة، أو الصيانة، أو الوفاء بدين على الوقف.¹⁹²
 3. عمارة وإصلاح الوقف: كمراقبة عقارات الأوقاف والقيام بصيانتها وإعمار ما خرب منها.¹⁹³
 4. الدفاع عن الوقف والمحافظة عليه، أمام المنازعين والمخاصمين للوقف، وسواء فعل ذلك بنفسه أو وكل غيره أمام الجهات القضائية، مع تحمله كافة تكاليف القضايا والمحامين من غلة الوقف.
 5. أداء ديون الوقف: وهي دفع كافة الديون التي على الوقف من الإيرادات المحصلة، وأداء هذه الديون مقدم على الصرف إلى المستحقين.¹⁹⁴
 6. إجارة الوقف: وهي القيام بإيجاره أعيان الوقف، حيث لا تجوز لغيره فعل ذلك وفق شروط الواقف وشروط الإجارة، والتي من أهمها على سبيل المثال أجره المثل.¹⁹⁵
 7. زراعة أرض الوقف، وهي واستغلال وتنمية أراضي الزراعية بأي طريقة تحقق مصلحة الوقف.
 8. تنمية أعيان الوقف، وهي أما بالبناء على أرض الوقف، أو تغيير معالم الوقف، وذلك بتحويل أشكال الانتفاع بأعيان الوقف، مثل تحويل محل تجاري إلى عمارة سكنية.¹⁹⁶
 9. تحصيل ريع الوقف، وهي تجميع الإيرادات ونسب المحاصيل الزراعية.¹⁹⁷
 10. ابدال واستبدال أعيان الوقف،¹⁹⁸ طبقاً للشروط والضوابط التي سوف يتناولها الباحث لاحقاً في الصيغ الاستثمارية المتبعة.
 11. استثمار الأوقاف: وهي استثمار الأوقاف بكافة أشكالها، والتي تتوافق مع طبيعة الأوقاف.¹⁹⁹
- 4. التصرفات التي لا يجوز للناظر القيام بها**
1. الاستدانة على الوقف: وهي أن يستدين الناظر على الوقف، سواء باستقراض أو شراء ما يلزم للعمارة أو الزراعة، وقد منع خوف على أعيان من الحجز.²⁰⁰

192 الكبيسي، أحكام الوقف، ج2، 195، 198.
 193 عثمان جمعة ضميرية، "استثمار أموال الأوقاف على التعليم وأساليب إدارتها" في مؤتمر أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، (الشارقة: جامعة الشارقة، 2011م)، 6.
 194 راغب السرجاني، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر، 2010م)، 77، 78.
 195 محمد بن أحمد الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2001م)، 111.
 196 الكبيسي، أحكام الوقف، 201، 112، 202.
 197 قاروت، وظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامي، 162.
 198 أبو غدة، شحاته، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، 116.
 199 محمد بن سعد الحنين، الولاية والنظرة المؤسسية على الوقف: دراسة فقهية، ط2، (الرياض: مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، 2018م)، 167.
 200 الكبيسي، أحكام الوقف، 204.

2. رهن الوقف: "لا يصلح أن يرهن القيم الوقف بدين، لأنه يلزم منه تعطيله، فلو رهن القيم داراً من الوقف وسكن المرتهن فيها، قالوا: يجب عليه أجرة مثلها، سواء كانت معدة للاستغلال أو لم، احتياطاً في أمر الوقف."²⁰¹
3. إعارة الوقف: يمنع على الناظر إعارة الوقف، إذا لم يكن من ضمن الموقوف عليهم، لما في الإعارة من استغلال لعين الوقف، بلا مقابل، أو كونها نوع من التبرع، وأعطي منفعة أو تملك منفعة بغير عوض، وبالتالي تفويت المنفعة، وضياع لها، إضاعة للحقوق المستحقين.²⁰²
4. المحاباة على الوقف: ليس للناظر أن يؤجر الوقف لنفسه، ولو كان ذلك بأجر المثل، لأن هذا مخالف للشرع، إذ لا يتولى الواحد طرفي الواحد العقد إلا في مسائل مخصوصة ليس هذا منها، أما لو قبل الإجارة من القاضي صحت، أيضاً لا يجوز أن يؤجر الناظر لمن تقبل شهادة له، كعائلته أو غيره، وأصوله وفروعه، لعدم توفر شروط العقد سابقة الذكر.²⁰³
5. تأخير صرف الربيع: لا يجوز للناظر تأخير صرف ربيع الأوقاف من سنة إلى أخرى، بدعوى قلة المردود، أو بسبب تأخير المستأجرين في دفع أجرة الأعيان المؤجرة، أو لأي سبب آخر وهي من الظواهر المنتشرة في وقتنا الحاضر،²⁰⁴ حيث قامت بعض وزارات الأوقاف بتأخير صرفها ولأسباب عديدة والتي من أهمها ضياع حجج الوقف وشروط الواقف وتدخل قوانين الأوقاف في تحديد المستحقين، مثلاً قامت الهيئة العامة للأوقاف في ليبيا بتأخير صرف المستحقات ولمدة طويلة بلغت عشرات سنوات بدعوة إيداعها في حسابات قابضة غير قابلة للصرف للحفاظ على ربيع الأوقاف من السرقة والاستيلاء ولأن الدولة في ذلك الوقت تكفلت بالإنفاق على المستحقين سواء كانوا أفراداً أو جهات مثل المساجد والزوايا وغيرها، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمستحقين لهذه المبالغ المجمدة.²⁰⁵
6. التسكين في أعيان الوقف: لا يجوز للناظر أن يسكن في أعيان الوقف دون دفع أجرة، بأقل من أجر المثل، تحقيقاً لمصلحته الشخصية، أو مجاملة لشخص أو مسؤول في الدولة،²⁰⁶ فمثلاً قامت وزارة الأوقاف في ليبيا في فترة ازدهار الفكر الاشتراكي بتسكين المواطنين في مسكن

201 نفس المرجع، 139

202 السرجاني، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، 81، خالد عبد الله شعيب، النظرة على الوقف (الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2006)، 269.

203 الابياني بك، كتاب مباحث الوقف، 64.

204 فيصل بن جعفر عبد الله بالي، يد الناظر على الوقف بين الأمانة والضمان، 32، 327.

205 مفتاح الرقيب، برنامج حوار المساء، عنوان الحلقة، قوانين الوقف بين التفعيل والتعطيل، الدقيقة (26:55).

206 بالي، يد الناظر على الوقف، 327.

الأعمار والصيانة،¹⁹ وهو ما أكد عليه كل من منتدى قضايا الوقف الأول ومجمع الفقه الإسلامي الدولي.²⁰

5. استثمار أموال التامين:

وهي الأموال التي استقطعت من المستأجرين للعقارات الموقوفة للتعويض على الأضرار والتلف المتوقع للعقار المستأجر، أو لمواجهة عدم دفع الأجرة من قبل المستأجر، والأصل إنها باقية على ملك أصحابها،²¹ وقد أجاز منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ذلك في نص القرار البند 6، "بأن لا يجوز استثمار التأمينات المأخوذة من مستأجري عقارات الوقف للتعويض عن إتلاف العقارات المستأجرة أو التخلف عن دفع الأجرة إلا بإذن أصحابها".²² فإذا حصل استثمار بدون أذنتهم وجب على إدارة الأوقاف قسمة الأرباح المتحصل عليها بينهم بالتساوي.²³

المبحث الثاني: الضوابط الشرعية والاقتصادية لاستثمار الأموال الوقفية

إن أموال الوقف سواء كانت عقارية أو نقدية لها وضع خاص، لذا لم يجز الفقهاء التصرف فيها بالغبن، أو الإهدار أو سوء التصرف، لذلك قبل الدخول في الاستثمار يجب معرفة الضوابط الشرعية والاقتصادية، وأخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ عملية الاستثمار واختيار الصيغ الاستثمارية التي تتناسب مع كل مورد وقفي، حيث يوجد العديد من هذه الضوابط والتي من أهمها: الضوابط الشرعية لاستثمار أموال الوقف العامة والخاصة بالإضافة إلى الضوابط الاقتصادية: وتعرف الضوابط الشرعية والاستثمارية بأنها: "مجموعة من المعايير الشرعية المستنبطة بصفة أساسية من قواعد أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات الاقتصادية والحكم عليها بين الحل أو التحريم".²⁴

أولاً: الضوابط الشرعية لاستثمار أموال الوقف:

يحكم استثمار الأموال الوقفية مجموعة من الضوابط العامة والخاصة المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية، وهي تنقسم إلى عدة أنواع:

19 أنس ليفاكوفيش، تأصيل ريع الوقف، (الكويت: الأمانة العامة للوقاف، 2016م)، 75.
 20 قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بند رقم 7، قرارات وفتاوي منتدى قضايا الوقف الأول بند رقم 7.
 21 الشعيب، استثمار أموال الوقف، 245.
 22 قرارات وتوصيات مننديات قضايا الوقف الفقهية من الأول إلى السابع، البند 6، (الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2015م)، 11.
 23 الشعيب، استثمار أموال الوقف، 249.
 24 شحاته، الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق، 32.

دفعة واحدة، يعقود بيع مستقلة متعاقبة وبعدها يحقق المشروع الأرباح، توزع الأرباح بينها وفق الحصص المتفق عليها، على أن يتعهد الممول بالتنازل عن حصته أو أسهمه بعد حصوله على أرباحه وقيمة مشاركته في المشروع مع انتهاء المدة المتفق عليها، مع وعد من المصرف بالتنازل عن حقوقه بعد استرجاع قيمة التمويل المشروع مع الأرباح،²⁰⁹ وهناك عدة أشكال لصيغة المشاركة المتناقصة، ولكن التي تناسب طبيعة الأوقاف وشروطها صيغتين هما:

الشكل الأول: عن طريق الحصص بأن تحدد الحصص من المصرف والأوقاف في رأس المال الشركة والتي تكون نسبيه حسب احتياج الأوقاف لتمويل المشروع، حيث لا يشترط أن تكون متساوية، أما توزيع الأرباح، فتكون حسب المشاركة وتقسّم الأرباح إلى ثلاثة أجزاء، نسبة للمصرف أو الممول كعائد تمويل ونسبة للأوقاف كعائد من استثمار الأرض، ونسبة لسداد تمويل المصرف²¹⁰، على أن يتعهد المصرف أو الممول بالتنازل على حصته للأوقاف خلال مدة معينة يتم تحديدها على حسب التمويل والمشروع، وأيضاً على حسب قيمة الدفعات المالية إلى سدادها الأوقاف.²¹¹

الشكل الثاني: عن طريق الأسهم بأن يحدد نصيب كل من المصرف والأوقاف في صورة أسهم، تمثل قيمة الشراكة بينها، ويتم توزيع الأرباح حسب عدد الأسهم، على أن يشترط الوقف هذه الأسهم كل سنة حتى يمتلك الوقف كل الأسهم.²¹²

د. سندات المقارضة (صكوك المضاربة)

تعتبر هذه الصيغة من الصيغ الحديثة في المضاربة، والتي تستخدم الصكوك الشرعية في تجميع الأموال لازمة للاستثمار، وهي عبارة عن مستند أو وثيقة محصلة في رأس المال المضاربة، وقد جاءت فكرة هذه السندات من مشروع البنك الإسلامي الأردني والتي صيغت في القانون الأردني المؤقت رقم 10 لسنة 1980م، وذلك بطرح هذه السندات على الجمهور لغرض إعمار الأراضي الموقوفة.²¹³

209 الهيتي، الوقف ودوره في التنمية، 89، نزيه كمال حماد، "المشاركة المتناقصة وأحكامها في ضوء العقود المستجدة"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 13، ج2، (مارس، 2004م)، 513.

210 ماجر ناصر الجبوري، إيمان عبد الله الجبوري، "المشاركة في المصارف الإسلامية"، مجلة العلوم الاجتماعية 20 (1434هـ)، 359. 211 راشد بن أحمد العليون، "الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقف"، اللقاء السنوي للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية، جمعية البر بالمنطقة الشرقية، 5342، <http://tslibrary.org>، 20.

212 آية الله محمد التسخيري؛ مرتضى الترابي، "المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 15، ج 1 (مارس، 2004م)، 585.

213 السعد، العمري، الاتجاهات الحديث، 80.

ورعاية مصالحه وتحقيق أهدافه،³⁰ أيضاً أدى ذلك إلى تعيين ونقل وندب موظفين من الجهات العامة إلى إدارة الأوقاف بدون أن يكون هناك أي معايير خاصة في تعيينه في إدارة الأوقاف والتي تتطلب شروطاً ومؤهلاتٍ خاصة في إدارتها، منها معرفة أحكام الوقف وكيفية إدارة الأوقاف واستثمارها بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة بالفقه الإسلامي وأحكامه، والتي لا تتوفر في موظفي وزارات الأوقاف وهيئاتها.

17. نتج عن ارتباط الأوقاف بسلطة الدولة وتوجهاتها السياسية، أن أي خلل أو فقدان لهذه السلطة، يؤدي إلى فقدان شرعية أو أهلية الأوقاف من ناحية كونها أحد الإدارات العامة وليس ككيان مستقل تخضع لأحكام الفقه الإسلامي،³¹ فأقرب مثال على ذلك ما حدث في ليبيا الآن من غياب لكيان سياسي موحد وشرعي يقود البلاد مما أدى إلى حالة من الانقسام السياسي وهذا نتجت عنه آثار سلبية بشكل مباشر على إدارة الأوقاف، فقد تم تقسيم الهيئة العامة الأوقاف إلى جزين الهيئة العامة لوقف بطرابلس والأخرى في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى استقلالية العديد من المكاتب عن الهيئة العامة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الفصل الثاني: القوانين والتشريعات ودورها في واقع إدارة واستثمار الأوقاف

أولاً: طبيعة الدور القانوني في الوقف

كان لتدخل الدولة الحديثة في إدارة الأوقاف، دور كبير في صياغة قوانين الأوقاف، حتى تتماشى مع التطور الحاصل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نحو بناء المؤسسات العامة للدولة وتطوير إدارتها، مما انعكس على إدارة الأوقاف، وظهور إدارة حكومية تمارس دورها كمؤسسة عامة، وهي بذلك تحتاج إلى قوانين وتشريعات تنظم عملها كأحد الأنظمة الرسمية في الدولة، وتكمن أهمية وجود النظام القانوني في إدارة الأوقاف، في تحقيق مصلحة الوقف وحمائته، وذلك بوجود الرادع القانوني لأي سياسة إدارية أو اقتصادية خاطئة، من شأنها إضاعة أو إهمال الأوقاف قد يقوم بها أصحاب القرار والتي تعرضهم بذلك إلى العقوبات الجزئية والجنائية، بالإضافة إلى كونها رادعاً للمتعاملين مع الأوقاف من المنتفعين أو الطامعين، حيث أن الخوف من العقاب هو أكبر رادع يحمي الأوقاف وأعيانها من انتهاك حقوقها ومن سوء التصرف في ممتلكاتها، والتقصير في استثمارها، لهذا تقوم القوانين بدور كبير في حماية

30 عبد القادر عزوز، "ولاية الدولة لشؤون الوقف"، 35.
31 فؤاد عبد الله العمر، *إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية*، ط2، (الكويت: الأمانة العام للأوقاف، 2011)، 71.

- ويلخص الباحث أهم الوظائف الإدارية لمديرية الأوقاف في هذه المرحلة:
- أ. مدير الأوقاف: ويتم تعيينه من قبل الإدارة الرئيسية للأوقاف بإسطنبول، ومن أهم مهامه تسيير الإدارة الأوقاف، وتدقيق حسابات الأوقاف ومحاسبة المقصرين، وتطبيق كل القوانين المنصوص عليها من الدولة العثمانية.
- ب. وكيل الأوقاف: وهو من ينوب عن مدير الأوقاف في إدارة القائم مقامات والأقضية، وهو يمارس مهامه نيابة عن إدارة الأوقاف في الحسابات والمراجعات، وكذلك في فض المنتزعات التي قد تحدث بين الإدارة والخصوم أمام القضاء، وأيضاً تسجيل أملاك الأوقاف في السجلات.
- ج. أمين صندوق الأوقاف: وهو المسؤول المالي للأوقاف، حيث يستلم جميع عوائد الأوقاف من المحصل ويقوم بتنظيمها وتسجيلها في دفاتر خاصة من نسختين يحتفظ هو بنسخة، ويسلم الأخرى لمدير إدارة الأوقاف للاطلاع عليها وتوثيقها ومراجعتها.
- د. كاتب الأوقاف: وهو المسؤول عن كتابة القرارات ونسخ القوانين والحسابات في بعض الأحيان.
- هـ. المحصل: يتم تعيين المحصل من قبل مدير مديرية الأوقاف، حيث يتجول في الأسواق والمحلات التابعة للأوقاف في جميع المناطق والمدن التي يتم تكليفه بها، ويقوم بتحصيل المبالغ المالية المترتبة على استغلال عقارات وأراضي الأوقاف من المستأجرين، ويسجل ذلك في دفاتر خاصة ويسلمها إلى أمين الصندوق في الدائرة التابع لها.
- و. الخراص (المتمن): وهو مساعد المحصل في تخريف (تثمين) ومعرفة مقدار المبالغ المترتبة على الأراضي الزراعية أي مقدار ما يستوجب دفعه من مستغل الوقف، من محاصيل وثمار، والموقوفة لصالح المساجد والزوايا والفقراء والمساكين، حيث يقوم بكتابة ذلك في دفاتر بختمه، وهي وظيفة موسمية يتم الاستعانة بهم وقت الحصاد.
- ز. الصيرفي: وهو المسؤول على مصروفات ونفقات الأوقاف، وذلك من خلال رسائل رسمية من ناظر الوقف أو إدارة الأوقاف، ويسجل كل ما يقوم به في السجلات ويصدر وفق لذلك ما يطلق عليها جوامك، أو إيصالات لمختلف أغراض الصرف من صيانة وإعمار.
- ح. المحتسب: وهي وظيفة تتعلق بكبار العلماء والفقهاء ومشايخ العلم، ويتم تعيينهم من قبل القضاء أو إدارة الأوقاف لما تراه مناسب لها، وتتلخص مهمته في تنمية أموال الأوقاف، حيث

جدول رقم 2 توزيع الأملاك الوقفية في ليبيا

رقم	اسم المكتب	مساكن	محات	أراضي توسع	أراضي زراعية	حرفي	مكاتب وخدمات	الإجمالي
1	طرابلس	561						3239
2	مصراثة	18						1529
3	الجبل الغربي	5	17	984				1006
4	زليتن	72	58	11	827	2		970
5	المرقب	2	66	96	531	1	2	687
6	بنغازي	253	275	16	14	96	35	697
7	الجبل الأخضر	147	47	270	123	4		591
8	الزاوية	46	103	49	304	3		505
9	درنة	73	95	70	219	2	5	464
10	الجفارة		35		387			422
11	البطنان	58	60	0	235	0	4	357
12	المرج	33	31		266	6		336
13	النقاط الخمس	7	110		39			156
14	اجدايا	4	27					31
15	الواحات	13	10				4	27
16	نالوت	2	24		غير محدد			26
17	سبها	3	10	2	1			16
18	الكفرة		9		1			10
19	سرت	2	24					26
20	غدامس		5	2				7
21	الشاطئ				1			1
مج	-	1299	1006	516	3932	114	50	11.103

لسنة 2016م، القاضي بإنشاء هيئات عامة والتي من ضمنها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية، باعتبارها هيئة ذات شخصية اعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون مقرها مدينة طرابلس. بهذا تم إرجاعها إلى ما كانت عليه في السابق، ويستخلص الباحث من هذا العرض أن الأوقاف وخلال السنوات السابقة شهدت تحبطاً إدارية وتنظيماً كبيراً أدى إلى عدم استقرارها، وأثر بالسلب على الاستثمارات الأوقاف والبحث عن أفضل السبل لتطوير ودعم جميع مرافقها.

وبالنسبة لأنواع الوقف في ليبيا فإنه يوجد الأوقاف الخيرية وهي تشمل جميع الأوقاف الموجودة في ليبيا ماعدا الأهلية وهي قليلة نسبياً، مقارنةً مع الوقف الخيري، ثم الوقف الذري وهو الأكبر في ليبيا ومن أشهر الأوقاف الذرية أو الأهلية القائمة في ليبيا، هي وقف الدوكالي والتاغار، والمشاط، والمحجوب، والزروق، والبدري، ووقف منارة السبيعة، ووقف بن حسين، ووقف البلعزي، ووقف زقلام، ووقف عبد السلام الأسمر، حيث شمل وقف الدوكالي في مدينة مسلاته، ولم يمنع المشرع الليبي صراحة كما هو الحال في بعض الدول العربية الوقف الذري لكنه بإصداره للقانون 16 لسنة 1973م أحجم الوقف الذري وأصبح الوقف الأهلي ملكاً لمستحقه. كذلك يوجد وقف العقار من مباني وعقارات وأراضي ووقف المنقول ويشمل الكتب والمساجد للمساجد، والمصاحف، والمكيفات، والآلات الزراعية وغيرها من المنقولات ويشمل كذلك وقف الأسهم والحصص في الشركات، كما يوجد الوقف المؤقت والوقف المؤبد.

أما عن مجالات الوقف في ليبيا فهي تنقسم لعدة مجالات: وقف بناء المساجد، ثم الكتاتيب ثم الزوايا أو المنارات، ثم المحلات التجارية (الدكاكين) حول المسجد ثم المزارع والأشجار كذلك وقف المصاحف وكتب العلم ووقف الربة والتأليف... الخ.

أما فيما يخص القوانين والتشريعات الوقفية في ليبيا من 1971-2016م فنجد القانون الوحيد تقريباً الذي اهتم بالوقف وهو القانون رقم 124 لسنة 1972م وسبقه القانون رقم 10 لسنة 1971م، بشأن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، وكذلك أصدر المشرع الليبي القانون رقم 16 لسنة 1973م بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ثم صدر القانون رقم 21 لسنة 2010م الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972م، أما القرارات فنجد كما كبيراً منها التي أصدرت لتنظيم الوقف في ليبيا، ويلاحظ الباحث أن قلة القوانين الخاصة بالأوقاف راجع إلى إهمال الدولة له ولعقاراته واستثماره، حيث تم الاعتماد على القرارات الإدارية

والتنظيمية، ويمكن تقسيم إدارة الوقف في ليبيا زمنياً إلى إدارة وقفية أهلية وأخرى حكومية، فأما الأهلية فالوقف فيها خاضع للإدارة الأهلية المباشرة من قبل الواقفين أو من ينوب عنهم من نظار، ثم نجد مرحلة إشراف القضاء، إلا أن إشراف القضاء لم يكن ناجحاً في كل الأوقات والحالات وخاصة في استثمار الأوقاف وتطويرها، مما أدى إلى تعطيل العديد من الأوقاف وإنهاءها وتحويلها إلى خراب ولا زال وقف القضاء من حيث الأثر القانوني حتى يومنا كما نصت عليه مواد القانون رقم 124، ثم مرحلة الإدارة الحكومية وشهدت إدارة الوقف في هذه المرحلة استقراراً نسبياً ولكن بشكل عام حرصت الدولة على الاهتمام بحسن إدارة الأوقاف، وتنظيمها وبيان مهام ووظائف موظفيها وكذلك استغلاله واستثماره بالشكل الأفضل من ذي قبل.

ولقد مرت مرحلة الإدارة الحكومية في ليبيا بمراحل هي: مديرية أوقاف طرابلس ثم مرحلة الاستقلال ثم إنشاء الهيئة العامة للأوقاف ثم مرحلة الإدارة الذاتية (إدارة الواقف والنظار) ثم مرحلة حل الهيئة العامة للأوقاف ثم مرحلة إعادة إنشاء الهيئة العامة للأوقاف ويلاحظ أنه بعد تتبع المراحل التي مر بها الأوقاف في ليبيا أنه لم يتم الاهتمام باستثمار الأوقاف وتحسين وضعها من حيث الإيرادات والبحث عن الصيغ الاستثمارية الأخرى غير الإجارة بأشكالها المختلفة بل كان اهتمام الدولة والسلطات والقيادة العليا التي تولت شؤون الأوقاف هو البحث فقط عن تبعية الهيئة وانتقالها من وزارة إلى أخرى، ومن وزارة إلى هيئة عامة، مما يدل على إهمال الأوقاف وشؤونها والاهتمام فقط بالمساجد والخطباء ومراكز تحفيظ القرآن.

أما عن أنواع الإدارة الأوقاف الحالية في ليبيا فهي تنقسم إلى نوعين أساسيين الأول هو الإدارة الحكومية العامة والتي تدير الأوقاف من خلال إدارتها المركزية بمدينة طرابلس، ومكاتبها المنتشرة في جميع المدن وفروعها وذلك للإشراف المباشر على الأوقاف وعقاراتها، والإدارة الأهلية، والتي تتكون من الإدارة الذاتية وإدارة اللجان الأشرافية. علماً بأن مكاتب الهيئة وصلت حتى هذه السنة 39 مكتباً بمختلف مناطق ليبيا، وبالنسبة للهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف فهي تمثل أحد الإدارات الثلاث الرئيسية في الهيئة العامة للأوقاف والإدارتين الأخرين هما: إدارة الحج والعمرة وصندوق الزكاة. فيما بلغ عدد الموظفين بالهيئة العامة 2100 موظفاً حتى سنة 2017م، أما الهيكل الإداري لإدارة الوقف فقد تم إعادة تنظيم إدارة الأوقاف أو إدارة شؤون الوقف، بعد صدور القرار رقم 48 لسنة 2012م ويتكون الهيكل الإداري بإدارة الأوقاف من

عدة أقسام منها قسم أملاك الوقف وقسم الإيرادات وإدارة الاستثمار... الخ. ولكل منها اختصاصات ومهام معينة، وبالنسبة للموظفين فمع ضخامة حجم الأوقاف الخيرية وتزايد مشكلاتها وتعدد متطلباتها وإنفاقها، فإنه لا يتجاوز عدد موظفيها في ديوان الهيئة عن 23 موظف، و50 موظف في المكاتب الثمانية المسؤولة عنهم الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل مباشر، وهو حوالي 100 موظف في باقي المكاتب وعددها 39 مكتب.

أما وظائف إدارة الأوقاف الحالية فهي من ناحية إدارية وتشمل: حصر أملاك الوقف ويعتبر آخر حصر قامت به الهيئة هو سنة 2010م وفيه يلاحظ أن الصيغة الوحيدة المتبعة هي صيغة الإجارة بالإضافة إلى ضخامة الثروة الوقفية في ليبيا والتي أغلبها عقارات، وعليه بعض الملاحظات أنه لم يشمل الممتلكات الوقفية خارج ليبيا، والوظيفة الثانية وهي رفع قيمة الإيجار بأجر المثل وهو ما نظمه القانون رقم 21 لسنة 2010م، تحصيل الإيرادات وإنفاقها، وبالتأمل في كشف إيرادات الهيئة حتى 2017م يجد أن نسبتها متدنية جداً لا تزيد عن 2% من حجم الميزانية العامة المخصصة من الدولة، حيث تأثرت هذه المرحلة بعدة عوامل منها تطبيق أجرة المثل والتي ساهمت في ارتفاع قيمة الإيرادات كما حصل في سنة 2010م وكذلك التأثر بالأحداث السياسية عام 2011م.

أما عن أوجه الإنفاق فتتنوعت من أعمال صيانة إلى شراء مستلزمات المساجد إلى مكافآت أفراد. ثم من المهام نجد المحافظة على مال البدل وحساب الاستثمار وقد بلغ مال البدل حتى نهاية سنة 2017م، 5,036,492.73 (مليون دينار ليبي)، فيما بلغ حساب الاستثمار حتى نهاية نفس السنة 108,976,433.846 (مليون دينار ليبي)، كذلك ثم المطالبة بتحصيل ديون الأوقاف وكانت حتى آخر حصر قيمتها بالدولار هو (527.490.619 مليون دولار) وآخر المهام لهذه الإدارة هو الاستثمار الذاتي للأوقاف، وقد قامت الهيئة العامة للأوقاف بشراء بعض المشاريع الاستثمارية العقارية الجديدة، كاستثمار ذاتي من خلال الأموال المجمد لديها في حساب الاستثمار، وحساب البدل، والمتمثلة في مباني إدارية وتجارية بهدف تأجيرها بلغت قيمتها 26.950.000 مليون دينار ليبي في كلاً من مدينتي طرابلس ومصراته.

ولقد مرت إدارة استثمار الوقف بمراحل صاحبها إصدار قوانين وقرارات منظمة له وتوجد الصيغ التالية في استثمار أملاك الوقف في ليبيا وهي صيغة الإجارة وقد مرت صيغة الإجارة في

ليبيا بعدة مراحل كونها الصيغة النفعية أو الاستثمارية الوحيدة المطبقة في ليبيا، ومما يلاحظ أنه منذ صدور أول قانون للوقف في ليبيا وهو القانون رقم 124 لسنة 1972م لم تعامل الأملاك بالمثل فيما يخص الإجارة حتى صرح ذلك بموجب القانون رقم 21 لسنة 2010م، ثم صدر القرار رقم 208 لسنة 2014م، بشأن تنظيم أملاك الوقف، والذي نص في مادته الأولى أنه لا يجوز بقاء أعيان الوقف بدون إجارة إلا في الحالات التي تعذر فيها ذلك، إلى غير ذلك من التشريعات المنظمة للإجارة. ثم صيغة الاستبدال ومال البدل والبيع، والاستبدال شرعه القانون رقم 124 لسنة 1972م وكذلك أيدته فتوى دار الإفتاء الليبية أما استثمار مال البدل فهو لا يعتبر مال البدل كصيغة استثمارية بل كونه صيغة تمويلية، ومال البدل يمكن استثماره بشكل مباشر في أي صيغ استثمارية مناسبة لقيمة المال المحصل أو وفق شروط الواقف، أما استثماره بشكل غير مباشر وذلك بشراء عقارات بديلة للعقار المستبدل، وينتج مال البدل عن طريق استبدال الوقف بالنقد، أو بيع العقارات القزمية التي لا يرجي منه مرود اقتصادي وأعطى القانون رقم 124 الحق في ذلك. ثم البيع وهو في الأصل ممنوع شرعاً لأعيان الوقف لكن في الأمر استثناء حيث أجاز العلماء ذلك إذا تعارض مع مصلحة كبرى، وهي في الغالب توسعة مسجد، أو خراب العقار الذي لا يرجى منه منفعة غير أن المشرع الليبي اشترط شروطاً للبيع، كما توجد صيغاً أخرى كان معمولاً بها في السابق تم إيقافها وقد نص القانون في المادة 44 بشكل صريح على عدم جواز استخدام صيغ الخلو والحكر والإجارتين، أما صيغ المغارسة فقد أجازتها المالكية بشروط لكن المشهور هو المنع في مذهبه وهو مذهب هذه البلاد، كما توجد صيغة الخلو وصيغة الحكر وصيغة الإجارتين وصيغة المزارعة والمساقاة، ويرى الباحث ضرورة البحث عن إعادة النظر في هذه الصيغ من المنظور الحديث بحيث تتلاءم مع استثمار أراضي الأوقاف، وإصدار قوانين خاصة لها تشرع استخدامها، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها شرعاً. وأخيراً للدولة الليبية بشأن تنظيم استثمار الوقف قوانين هي القانون رقم 124 لسنة 1972م وهو التشريع الأصلي والقانون رقم 21 لسنة 2010م الذي نظم أجرة المثل لأعيان الوقف، وبعض القرارات المنظمة.

8. ضرورة تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في إدارات الأوقاف، من رفع قيمة المرتبات، والعلاوات، والتأمين الصحي وغيرها من العوامل الجاذبة للكفاءات والقدرات البشرية المؤهلة والقادرة على تطوير إدارة الأوقاف والسير بها نحو تحقيق مصلحتها وأغراضها.³⁵²
9. يجب أن تتولى إدارة الأوقاف قيادة عليا مؤهلة مميزة، ذات طابع مهني وإداري، تمتلك من الخبرة والكفاءة بحيث تقوم على إدارة الأوقاف، وتعمل على التنسيق بين الإدارات العليا والإدارات الميدانية والإدارية والمالية، لأن هذا التنسيق ضروري لتنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب والذي يحقق مصلحة الوقف والموقوف عليهم والمجتمع.³⁵³
10. ضرورة تمكين هيئة رقابة شرعية كهيئة رقابية جديدة ضمن الهيكل الإداري لهيئة الأوقاف، وبشكل مستقل عنها، توكل إليها مهام الرقابة على شؤون الوقف، حيث تستمد وجودها من شروط الواقف ومن القوانين والأنظمة الأساسية لإدارة الوقف.³⁵⁴
11. يتضمن تشكيل هيئة رقابة شرعية متخصصة في الرقابة على الأوقاف، سواء على المستوى المركزي أو المحلي على ألا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص متخصصين في الأوقاف من قضاء ومحاسبين، واقتصاديين وفقهاء، حتى يمكن لهم مراقبة وتوجيه مؤسسات الأوقاف نحو تحقيق أهداف الأوقاف المرجوة، وتكون المرجعية لها، فترشدهم نحو العمل على أفضل وجه، وذلك كما هو معمول به في المصارف الإسلامية.³⁵⁵
12. يجب أن تتمتع الرقابة على الأوقاف بخصوصية وهي وجوب فصل الرقابة على الأوقاف إلى نوعين: النوع الأول يتمثل في الرقابة الإدارية والمالية التابعة للدولة وتختص في متابعة الأعمال الإدارية، ورصد وتدقيق ميزانيات المخصصة لها من الدولة وأوجه صرفها، أما النوع الثاني من الرقابة فتكون الرقابة القضائية والشرعية والتي تخصص في مراقبة الإيرادات للوقف ومصروفاته وصيانة عقاراته وعقوده واستثماره، وكل الأعمال المتعلقة بإدارة الأوقاف والتي تتطلب جهاز رقابي لديه الخبرة والمعرفة بأحكام الوقف وقوانينه.

352 مطهر سيف أحمد نصر، "التنظيم المالي والإداري الأمثل لاستنهاض الوقف الإسلامي المعاصر" في مؤتمر أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية (الشارقة: جامعة الشارقة، 2011م)، 20.
 353 سامي الصلاحات، "تطوير الأسس الإدارية للمؤسسات الوقفية"، 12.
 354 كمال منصور، "ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف"، 160.
 355 عبد القادر بن عزوز، "ولاية الدولة لشؤون الوقف"، 50-51.

تدرجية وطويلة المدى، وهو قرار خطير جداً خاصة في ظل ظروف البلاد الحالية، ولكي تتحقق استقلالية الأوقاف ولو مستقبلاً يجب أن تتم توعية الناس بالوقف، والعمل بأجرة المثل في الإجارة، ودفعها في الموعد، والحد من اعتداء بعض الجهات العامة على أعيان الوقف، وكذلك الحد من مصادر الدولة للأراضي غير المستغلة للوقف... الخ.

ومن ضمن مساهمة الدولة في إضعاف الوقف في ليبيا عدم التطوير وخير مثال على ذلك لم يصدر قانون للوقف منذ سنة 1972م وكذلك عطلت مقترحات ومساعي وقوانين إنشاء مؤسسة للأوقاف في فترات معينة، واستبدلت بقرارات معينة. ثم تأتي مشكلة تعويضات أملاك الوقف من قبل الدولة حيث قامت الدولة بنزع ملكية بعض عقارات وأراضي الأوقاف لأغراض مختلفة، وحتى بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 2010م، والذي مكن الهيئة من تحصيل ديونها سواء من الأفراد أو الجهات العامة إلا أن القانون لم يفعل إلا بعد سنة 2015م، وعلى الأفراد فقط ولم يتم تطبيقه على الجهات العامة، وبلغ ما حصلته الهيئة من ديونها 50 مليون دينار حتى عام 2010م علماً بأن ديونها تبلغ أكثر من 563 مليون دينار، فيما بلغت نسبة الاسترداد 8.87% فقط.

ثم تأتي مشكلة سرقة واستيلاء الأفراد والنظار وكبار الموظفين، حيث وفر تقلب الظروف السياسية والأمنية وما عاقبها من انتشار الفتن والقتال وضعف إدارة الأوقاف واستهتار موظفيها، وضعف الواع الديني لديهم، الظروف تسهيل عملية سرقة الأوقاف، ومما سهل هذا الأمر عدم وجود الرادع بسبب عدم تطبيق الإجراءات والآليات التي تحمي الأوقاف من الاعتداء وهذا كله أدى إلى تسهيل الاستيلاء عليه رغم وجود القوانين لكنها غير مفعلة، كذلك بقاء المستأجر لفترات طويلة، والذي مع طول المدة أعطاه الحق في البقاء فيها وتوريثه، ثم تبرز مشكلة غياب ثقافة الوقف لدى عامة الناس التي أصبحت ضعيفة، مما أدى إلى استباحته وعدم احترام قدسية الأوقاف، وهذا رافقه عدم وجود توعية لهم من قبل الدولة وغيرها. ومن المشاكل عدم رغبة المستأجرين الخروج من عقارات الأوقاف وتوارثهم للأبناء، وأيضاً إهمال الأصول الوقفية من قبل بعض أجهزة الدولة الرسمية، مما أدى إلى الخلط بين الملكية العامة والملكية المخصصة للأوقاف، وأيضاً عدم التوعية الدينية والإعلامية، كذلك تركيز الوقف في مجالات معينة حيث يتركز أغلب الأوقاف في مجال العقارات والأراضي لصالح المساجد، وإهمال الأوقاف على النواحي الأخرى، أيضاً إهمال الأوقاف على المنقول وخاصة النقود، وما يتبعها من حصص وأسهم في الشركات الاستثمارية، ومنح الدولة الإشراف في كثير من الوقف المنقول لجهات غير هيئة الوقف.

ومن المشاكل وجود أرصدة مالية مجمدة كبيرة جداً في حسابات قابضة لدي المصارف تحت حساب قابض، والذي لا يستطيع الموقوف عليه مثل المسجد صرف هذا المبالغ، كذلك من المشاكل كثرة المنازعات الوقفية أمام القضاء ومن أسبابها عدم وعي العامة لحرمة الأوقاف وطمع المستأجرين، وأيضاً من المشاكل عدم تبليغ المواطنين عن الأوقاف المجهولة أو الضائعة، حيث أن هناك الكثير من العقارات التي لم يتم تسجيلها في المحاكم الشرعية أو في السجل العقاري وخاصة الأوقاف الأهلية، كذلك يضاف إلى ما سبق بروز مشكلة هلاك الأصل وتقادمه حيث إن معظم العقارات والمباني والمحلات التجارية هي في الأصل قديمة جداً وهو ما يتخذ ذريعة للاستلاء عليها بعد صيانتها بصيغ استثمارية غير مجدية. ومن المشاكل إلغاء الوقف الأهلي (الذري) وهو الذي أدى لمنع الكثير من الواقفين عن الوقف لأنه جزء مهم من الأوقاف الخيرية وكان أولى بالدولة بدل إلغاءه أن تقوم بتنظيمه، وأن تفرض قيود ورقابة داخلية وخارجية عليه، ومن المشاكل ضعف الإيرادات المحصلة ويتمثل ذلك في ضعف الإيرادات المحصلة من الانتفاع بالأوقاف مقارنة مع المفترض تحصيله، وهذا راجع لعدم حرص الإدارة في تحصيل الإيرادات، وعموماً إن أسباب تدني إيرادات الوقف في ليبيا ترجع لعدة أسباب هي تكفل الدولة بالصراف على الوقف وموظفيه فلم يوجد لديهم الحافز لتحصيل الإيرادات، ثم أن أملاك الوقف تعامل معاملة أملاك الدولة، ثم عدم قيام المنتفعين بأملاك الوقف بتجديد العقود وبدفع ما عليهم من التزام نحو الأوقاف ثم لا يوجد جهاز قوي تابع لهيئة الأوقاف يلزم المنتفعين بدفع ما عليهم سواء عن طريق الجبر القضائي أو عن طريق الحجز الإداري، ثم لا يوجد توجه استراتيجي نحو استثمار أموال وأعيان وممتلكات الوقف، كذلك تدني قيم الإيجارات للوقف. ثم مشكلة الرقابة وهي خضوع الوقف للرقابة الدولة فقط مما سبب في عدم الاهتمام به وباستثمار إيراداته وفي أوجه المناسبة، أو شراء عقارات بديلة، وأخيراً نجد عزوف الناس عن الوقف الجديد أو دعم الأوقاف القديمة.

وعند البحث في المشاكل الإدارية المتعلقة بإدارة الأوقاف تبين أن إدارات الأوقاف تعاني في ليبيا من عدة مشاكل سواء كان على مستوى ديوان الهيئة أو على مستوى المكاتب والفروع والمشاكل هي عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد، وضعف التدريب الوظيفي، وقلة عدد الموظفين المتخصصين في إدارة الاستثمار الوقفي، وعدم الاستقرار الإداري، وانتقال تبعية الهيئة في كل فترة زمنية من جهة إلى أخرى، مما أثر سلباً على أدائها الإداري والاستثماري، بالإضافة إلي وضعف نظام الأجور والمرتبات الخاصة بالموظفين بالهيئة، مما تسبب في أن موظفي الأوقاف يعلمون برتبة ولا يتم تحفيزهم

من الإدارة للقيام بعملهم بشكل متميز، كذلك المركزية الشديدة في إدارة الأوقاف، وربطها ببعض الوزارات والإدارات العامة، وغياب البيانات والأصول المتعلقة بالوقف في ليبيا، حيث لا توجد المستندات التي تثبت هذه الأصول ويتم إثبات ذلك بشكل غير رسمي فقط من خلال الناس وشهادتهم التي تعتبر وسيلة إثباتها.

وبعد دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار الوقفي في ليبيا تبين أنه تدور حول المشاكل التالية وهي: التأجير بالباطن، حيث أن نسبة كبيرة من العقارات المؤجرة في المدن الكبيرة في ليبيا هي مؤجرة بالباطن، ومشكلة عدم رغبة المستأجرين للعقارات وأراضي الأوقاف في الخروج منه بعد إنهاء العقود، وغياب الخطط والبرامج والدراسات لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة للاستفادة من الإيرادات التراكمية المتزايدة، وعدم قدرة الهيئة على تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية، وذلك لصعوبة اتخاذ القرار الاستثماري وخضوعه للروتين الإداري البطيء، وكذلك عدم تسهيل الإجراءات الاستثمارية وامتلاك الهيئة العامة للأوقاف أرصدة مالية مجمدة لدى المصارف دون أن تستفيد منها، بأي نوع من أنواع الاستثمار سوء العقاري أو المالي، والتي منها مال البدل، وحساب الاستثمار وقيمة التعويضات، ووجود عدد من الإداريين غير الأكفاء على قمة الجهاز الإداري الأمر الذي أعاق تنمية واستثمار الأوقاف، بالإضافة إلى وجود العديد من أعيان الوقف المهجورة والتي لم يستفاد منها وبعضها أرض بيضاء أو بور، وعزوف المستثمرين على الاستثمار في عقارات الأوقاف مع أنها ذات قيمة اقتصادية كبيرة بسبب ضعف القوانين المشجعة والمركزية الإدارية وارتفاع تكاليف الاستثمار في ليبيا.

ثم توصل الباحث للكشف عن معوقات الاستثمار الوقفي، وهي المعوقات السياسية ثم القانونية ثم الإدارية ثم البيئة الاجتماعية، وأخيراً الاستثمارية، وتم عرض أهم الحلول لكل نوع منها، وبدائها بالمعوقات السياسية أو الحكومية وتتمثل في عدم الاستقرار الإداري للأوقاف بليبيا حيث أن البلاد كانت تدار بنظام اشتراكي والذي تسبب في عدم الاستقرار السياسي خلال العقد الماضي، والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد، والانقسام السياسي الموجود وسيطرة النظام السياسي على إدارة الأوقاف، مما نتج عنه مركزية القرارات ومدى تطبيقها، وعدم رغبة الدولة في إقامة مشروعات الاستثمار الخاصة بالأوقاف والتشجيع عليها، وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، واعتماد الهيئة على تمويل الدولة للميزانية السنوية، وذلك من نشأتها 1972م، وفي عدم البحث عن الصيغ الاستثمارية من غير الإيجار وعدم تقديم الدولة ضمانات كافية للمستثمرين، ثم هناك المعوقات الإدارية وتتمثل في عدم حصر أملاك الأوقاف بشكل كامل، وهذا راجع

إلى قلة الإمكانيات من وسائل النقل والأجهزة الفنية الخاصة بالمسح، وتردي الوضع الأمني للأوقاف حالياً، وعدم رغبة الموظفين والفنيين في الزيارات الميدانية خوفاً من الاعتداء عليهم، وضعف المرتبات، وعدم استفادة إدارة الأوقاف من نظم وتجارب المؤسسات المالية المعاصرة، وعدم الإفصاح والشفافية في نشر المعلومات على إدارة مال الوقف، وطرق استثماره ثم المركزية التي تعاني منها إدارة الأوقاف التي تكبل إدارة الأوقاف سواء الجوانب الإدارية أو الاستثمارية بالإضافة لمعوقات تتمثل في عدم التدريب المناسب لمن سيقوم بإدارة الاستثمار من موظفي الهيئة وكذلك نقص الخبرة لديهم.

ثم تبرز المعوقات القانونية التي تتمثل في عدم الاستقرار القانوني والتشريعي في ليبيا بشكل عام، والاعتماد على القرارات بدل القوانين وعدم صدور قانون خاص بالاستثمار في الأوقاف، ثم عدم وجود آلية تهتم بحماية أملاك الأوقاف واسترجاعها بسرعة، ثم كانت هناك المعوقات البيئية (ثقافة المجتمع) وتتمثل في عدم وعي المجتمع بمهية الأوقاف ودوره في المجتمع وأهميته، وحرمة، وأحكامه وخصوصيته عن باقي الأملاك، واعتقاد جل المواطنين أن أموال الأوقاف هي مال الدولة وعقاراتها ومحدودية الفهم لدور الوقف في الاستثمارات، خصوصاً لدى الواقفين ورؤية الوقف من منظور ضيق، فقد شاع اعتقاد خاطئ بأن هيئة الأوقاف هي عبارة عن مؤسسة دينية فقط تتبع الإدارة الحكومية وتعني بشؤون المساجد وصيانتها والاهتمام بها وإحجام الناس عن الوقف، خوفاً من أعداء الدولة على الأوقاف. وأخيراً كانت المعوقات الاستثمارية وتتمثل في استخدام بعض الصيغ الاستثمارية طويلة الأجل في السابق، التي أدت إلى ضياع الأوقاف وعدم الاستفادة منها مثل الخلو والحكر والإجارتين، والاستبدال، والتي امتدت آثارها إلى الآن وأضاعت الفرص للاستثمار واعتقاد المستأجرين أن الوقف قد خصص له، وأنه جهة خيرية يجب عليها أن تساعد الناس على تحسن دخولهم وقيامهم بالتأجير بالباطن في كثير من الأحيان وشح الوثائق الدالة على الوقف، وعدم وجود شهادة عقارية لنسبة كبيرة من أعيان الأوقاف، مما سبب عزوف المستثمرين، لعدم وجود ضمان ولا توجد رؤية واضحة أمام الهيئة بالنسبة لاستثمار الأوقاف والمجالات والصيغة المناسبة لطبيعته وعدم تقويم الأصول للأوقاف، ولم يتم إعداد دراسات جدوى اقتصادية خاصة لتقييم الأصول الموقوفة، بالإضافة لنقص المعدات والأجهزة التقنية اللازمة للمسح وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتسهيل الاستثمارات، كذلك من الملاحظ في الأوقاف في ليبيا أنه لا توجد مراقبة شرعية بها كجسم إداري.

الصيغة المناسبة هو من مهام إدارة الأوقاف، والبحث عن أفضل الصيغ هو أمر من شأنه أن يؤدي إلى مصلحة المجتمع ككل من تشغيل عناصر الإنتاج وزيادة الدخل القومي من خلال توفير فرص العمل لجميع عناصر الإنتاج المرتبطة بالأوقاف، والتقليل قدر الإمكان من صيغة الإيجار المطبقة حالياً في ليبيا حيث تكافؤ تكون هي الصيغة الوحيدة المطبقة.

ويرى الباحث إن تحقيق أغراض الوقف وأهدافه مرهون باستثمار أمواله وعقاراته، لأن مبدأ الاستمرارية الذي هو أحد أسس الأوقاف، والصدقة الجارية لا يمكن تحقيقه إلا باستثماره وإدامته، وبحسن التصرف فيها والمحافظة عليها من الضياع والإهمال، وهذا يتطلب العمل الجاد والإدارة الرشيدة مع توفير الكفاءة العالية والأمانة والإخلاص في العمل، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لطبيعة الأوقاف والبيئة المحيطة به، وإصدار القوانين والسياسات التي تدعم العمل علي ذلك خدمتها للصالح العامة وتحقيقاً لمصلحة الوقف والتي في النهاية لا تتعارض مع بعضها.

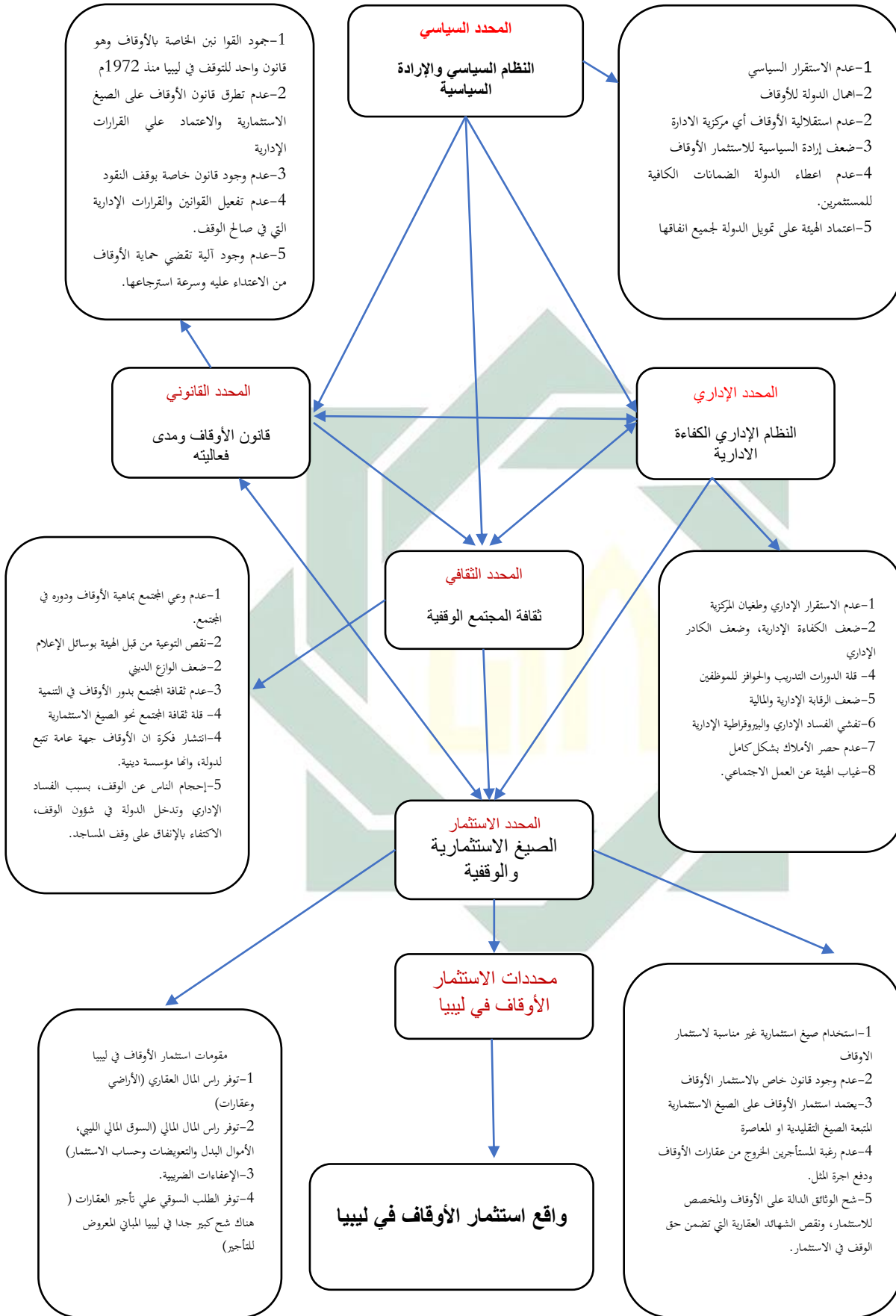
ولتوصيف دور صيغ الاستثمار كمحدد في واقع ومستقبل الوقف في ليبيا ينقلنا بداية إلى توضيح وبيان الفرق بين مردود الانتفاع وعائد الاستثمار من الوقف، حيث أن عائد الاستثمار هو أعلى من مردود الانتفاع العادي من خلال الإجارة مع أن نسبة المخاطرة في الإجارة منخفضة بالنسبة لصيغ الاستثمار، ذات نسب المخاطرة العالية نسبياً، إلا أن العائد منها يحقق إيرادات مجزية، مع إمكانية زيادة الإنفاق على الموقوفة عليه وهذا يحقق شرط الوقف من وقفه، وإن اختيار صيغ الاستثمار الإسلامية والتي تناسب طبيعة الأوقاف إذا ما أحسن اختيارها وفقاً لطبيعة الوقف تحقق أحسن العوائد، مع المحافظة عليه وهذا يتطلب العديد من المحددات والتي من أهمها، رغبة القيادة السياسية في استثمار الأوقاف، وتوفير اللوائح والقوانين الخاصة باستثمار الأوقاف والمحافظة عليه، وتوفير الكفاءات الإدارية والمالية، وأيضاً توفر البيئة المحيطة بالأوقاف مثل أعراف المجتمع بشكل عام نحو الاستثمار وثقافته بالنسبة للأوقاف، وأيضاً مدى توفر ثقافة وقناعة الموظفين والمنتفعين بالأوقاف بأهمية استثماره أو الانتفاع به، وماهية الصيغ الاستثمارية وأنواعها، وأخيراً مدى تنوع الأوقاف، ففي ليبيا مثلاً تتركز اغلب الأوقاف في المجال العقاري من مباني وارضى لصالح المساجد والتعليم الديني، وبالتالي تم إهمال الأوقاف المنقول والمؤقتة إدارتها واستثماراً حيث يوجد عدد محدود من الأشجار المثمرة الموقوفة والتي تم إهمالها بالإضافة إلي ومصاحف القرآن الكريم بعض كتب الفقه، أما وقف النقود فلم يتم تفعيله أو وجوده وذلك

العصور تعرض الوقف إلى الكثير من السرقات والنهب والاستيلاء، لأسباب عديدة والتي منها ضعف الوازع الديني، وعدم وجود رادع مناسب لها، وعدم تسجيل العقارات لدى المحاكم الشرعية أو لدى السجلات الخاصة بالأوقاف مثل السجل العقاري في العصر الحديث، كما أنه لم يصدر في حق الاستثمار الأوقاف في ليبيا إلا قانون واحد فقط شامل لكل أحكام الأوقاف والتي من ضمنها الاستثمار إلا أنه مر عليه زمن طويل دون إصدار قانون جديدة يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ولقد نصت التشريعات الخاصة بالأوقاف في ليبيا، أن تكون نفقات الأوقاف وإدارته تغطي من ريع الأوقاف، وإذا لم تكن كافية فتلجئ الإدارة إلى المصادر البديلة وهي الاستدانة والاستبدال والبيع بشكل ترتبي، مما يعطي انطباعاً بأن الأوقاف يجب أن تعتمد على نفسها في تدبير شؤون الأوقاف وأن تبحث عن أفضل الخيارات الاستثمارية والنفعية لزيادة عوائدها، وإن نفقات إدارة الأوقاف كونها ناظرة عليه تغطي من ريع الأوقاف ولا تتحملها الدولة، إلا أن الواقع كان غير ذلك، حيث دفعت الدولة جميع النفقات الملزم دفعها من ريع الأوقاف مما أدى إلى عزوف إدارة الأوقاف إلى تطوير نفسها وصيغها لمواجهة النفقات المتزايدة، وأدى هذا إلى كسل الموظفين والنظار على الوقف في البحث عن الطرق الحلول لمواجهة النفقات، وزيادة الإيرادات، حسب شرط الواقف والموقوف عليهم أو لصيانتها وتعميرها وأدى ذلك إلى بقاء الأوقاف في ليبيا كما الحال عليه الآن دون أي تغيير لا في القوانين أو تطوير صيغ الاستثمارية.

لقد أعطى الفقه الإسلامي صلاحيات الولاية العامة للأوقاف المتمثلة في ولاية الدولة على الأوقاف في حالة عجز الأوقاف في القيام بمقاصد الواقف، وبسبب الجهل بالأحكام الشرعية، وغياب الوازع الديني، وأيضاً عدم كفاءة الولاية والنظار في حفظ وصيانة وتنمية الأوقاف واستثمارها، وقد أدى كل ذلك إلى ولاية الدول الحديثة والمتمثلة في الإدارات لعامة التابعة للدولة، مما أدخلها ضمن القطاع العام، والذي نظمها وحصرها وأصدر التشريعات الخاصة بحمايتها، إلا أن ذلك لم يمتد طويلاً، حيث أدى إدخال الأوقاف في القطاع العام وما يشوبه من روتين وفساد إداري، وإهمال ناتج عن تبعية للدولة، إلى ضياع بعض أصوله وجمود وتعطيل ما

شكل 6 ملخص المحددات في استثمار الوقف في ليبيا



الأمنية الصعبة في عدم تمكن المستشارين والخبراء من القدوم للبلاد وحرمان الأوقاف من الاستفادة منهم، كما أن عدم الاستقرار السياسي والأمني أثر في إتمام تنفيذ عدة عقود أبرمت مع دول صديقة وشقيقة لرفع كفاءة الأوقاف وبقيت حبر على ورق بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.

أما المحدد الثاني فهو المحدد القانوني الذي يعد جزءاً أساسياً في واقع الأوقاف في العصر الراهن، فهو يوفر الإطار الشرعي والقانوني لحماية الوقف وتنظيمه وتطوره، وهو من أهم المحددات التي لها تأثير على الأوقاف إيجاباً أو سلباً، وسارت ليبيا على خطى أغلب الدول نحو تقنين الوقف، وكان أول القوانين هو القانون رقم 124 لسنة 1972م بشأن أحكام الوقف وتعديلاته، ويعتبر من القوانين المتقدمة جداً الذي أتاح للوقف الإمكانية للاستثمار، لكن رغبة الدولة في إبطاء الوقف وعدم تسريعه للتقدم استثماراً أو غير ذلك حال دون الاستفادة من هذا القانون، وأن القانون يعتبر اليوم هو أحد أهم المرجعيات التي يعتمد عليها في إدارة واستثمار الأوقاف، فالواقع أنه لا يمكن تسيير الأوقاف أو استثمار أعيانها بدون إصدار قانون خاص بذلك حيث يعطي القانون لإدارة الأوقاف والمستثمر الضمانات التي تتيح له إمكانية استثماره وضمان لرأسماله، كذلك يضمن لإدارة الأوقاف أخذ حقوقها واسترجاع العقارات في حالات التعدي عن طريق القضاء والتي يحمي هذه الحقوق القانون، وإن للتغيرات السياسية وتوجهات الدولة دور كبير في تشكيل وصياغة قوانين الأوقاف، وهي من أهم المحددات إلى أثرت في صياغة قوانين الأوقاف، وإن قوانين الأوقاف السائدة الآن قد ترسخت وتأصلت في ظل سياسة الدولة وتوجهاتها ومصالحها، كما له تأثير من جانب المذهب الفقهي السائد وهو المذهب المالكي، وبالتالي تبرز العلاقة الثلاثية بين الدولة والقوانين وإدارة الأوقاف التي تنطلق من قيام النظام السياسي بخطوة تقنين الوقف ثم تبعية إدارته لها وكانت النتائج ومنها إلغاء الوقف الأهلي وكذلك وظيفة النظار وإلغاء جسم إدارة الوقف نفسها أو ضمها لمؤسسات أخرى تتبع الدولة، من جهة أخرى، فضلاً على أن القوانين والتشريعات واللوائح التي تم وضعها في ليبيا لرعاية الوقف هي قوانين غير كافية حيث إن الوقف بحاجة مستمرة للمتابعة القانونية والعمل باستمرار على سن وإصدار التشريعات التي تواكب أي جديد فيما يخص الوقف في ليبيا، وأن القوانين والتشريعات في بعض منها في ليبيا فيما يخص الوقف قد أعاققت الاستثمار في الأوقاف وفي تنميته وحتى المحافظة على أملاك الوقف ربما دون قصد في ذلك.

ثم يبرز المحدد الإداري وبداية كان دوره من خلال الإدارة المركزية حيث انصبغت إدارة الوقف في ليبيا بمركزية إدارية بعد تدخل الدولة من خلال تطبيق المركزية في إدارة الأوقاف والتي قامت بعدة قرارات مصيرية أثرت في الوقف في ليبيا ومنها إلغاء وظيفة الناظر وعموماً الأوقاف في ليبيا تتصف بمركزية رغم اتساع البلاد لكنها مازالت تدار بأسلوب مركزي، ومن أهم مرتكزات هذا المحدد الإداري هو عنصر التدريب وتوفر الخبرة فيمن يتولون القيام بمهام إدارة الوقف في ليبيا حيث اتضح أن التدريب المقدم غير كافٍ والحاجة لدورات تدريبية حقيقية وفق استراتيجية متكاملة، وبالتالي نتج عن ذلك أن القائمين على إدارة واستثمار الأوقاف لا يتمتعون بالخبرة الكافية، فالحاجة تكمن في إيجاد خطة استراتيجية أو خطة متكاملة في هذا المجال.

كما تبرز أهم الوظائف الإدارية في هذا الموضوع وهو الرقابة الإدارية على الوقف وفي ليبيا تتولى الرقابة في إدارة الوقف نوعين من أنواع الرقابة وهي الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية بالنسبة للرقابة الداخلية تتمثل في إدارة المراجعة الداخلية، وفي مهام واختصاصات المراقب المالي الذي يتبع مباشرة لوزارة المالية كذلك النظم المالية تعد وسيلة مراقبة واللوائح المختلفة، وكذلك المكتب القانوني أما الرقابة الخارجية فتتمثل في رقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة ورقابة إدارية تتمثل في هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة إلى رقابة وزارة المالية على شكل ما يقدم إليها مثل كشوفات وميزانيات للحساب الختامي وميزانية الهيئة التي تلزم الهيئة بتقديمها كل نهاية سنة، وهناك الرقابة القضائية، والرقابة الشرعية التي تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية التي تخص أموال الوقف وكيفية التصرف فيه مثل دار الإفتاء وهناك شروط الواقفين التي تعد كذلك وجه مهم من أوجه الرقابة على أموال الوقف وأعيانه، إن أهداف الدولة في فرض الرقابة الإدارية والمالية على الأوقاف هي بسط سلطتها عليه واعتباره جزءاً من مرافقه العامة، بالإضافة إلى التحقق من سلامة الأعمال الإدارية والمالية وشرعيتها، ومطابقتها لقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، بالإضافة إلى فعالية وكفاءة مؤسسة الوقف في خدمة الصالح العام ومصحة الوقف.

ثم كان المحدد الاجتماعي والثقافي ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا حيث ساهم الوقف منذ نشأته في دعم المجتمع في جميع مناحي الحياة، والناظر لمحدد الثقافة ودوره في الوقف يجد إن الناس اليوم في ليبيا لا يثقون في الأوقاف لعلمهم أن المسؤولين عنها غير أكفاء للحفاظ على الوقف، ولذلك أحجموا عن وقف أموالهم في مرافق تعمل على تنمية الربح خوفاً من

الاستيلاء عليها من الدولة، والشيء الوحيد الذي يقوم به الناس هو بناء المساجد والمساهمة فيها وكذلك المدارس القرآنية، أما مجالات الوقف الأخرى فهناك عدم وعي كافٍ بها، وكذلك الخوف من الاستيلاء عليها، مع أنهم ليس لديهم وعي بنصوص القانون التي تعطي الحق للواقف أن يكون ناظراً على وقفه أو هو من يعين الناظر، والناس في السابق كانوا أكثر احتراماً ووعياً بالوقف وقديسيته لأن التعدي عليه من المحرمات وبدون مبالغة ضمن التراث في ليبيا إذا دخل الرجل أرض وقف ينفذ حذائه من التراب وذراته التي قد تعلق في حذائه خوفاً من أخذ ولو اليسير من هذه الممتلكات الموقوفة، واليوم في ليبيا لا نجد هذه الثقافة بذلك القدر عند الناس مع بعض الاستثناءات طبعاً. وكما وضح الخبراء في الوقف في ليبيا أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الناس عن الوقف أنه لا توجد توعية بالوقف ويلاحظ انتشار ثقافة اعتبار الوقف وأملاكه وممتلكاته حتى الإدارية منها من ممتلكات الدولة وفي المقابل نجد أن الدولة في ليبيا وتشريعاتها القانونية لها دور في توعية الناس والمحافظة على الوقف، وكما يقال الناس على دين ملوكها بالمقابل أن ثقافة المجتمع نحو الوقف سوف تؤدي إلى تفعيل الدور الذي ينبغي للمجتمع القيام به نحو إجبار الدولة للعمل على رعاية الأوقاف وحسن إدارته واستثماره، فالعلاقة بين الوقف وثقافة المجتمع والدولة هي علاقة تبادلية التأثير.

والمحدد الأخير هو محدد الصيغ الاستثمارية ودوره في إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا وصيغ الاستثمار الإسلامية والتي تناسب طبيعة الأوقاف إذا ما أحسن اختيارها وفقاً لطبيعة الوقف تحقق أحسن العوائد، مع المحافظة عليه وهذا يتطلب العديد من المحددات والتي من أهمها، رغبة القيادة السياسية في استثمار الأوقاف، وتوفر اللوائح والقوانين الخاصة باستثمار الأوقاف والمحافظة عليه، وتوفر الكفاءات الإدارية والمالية، وأيضاً توفر البيئة المحيطة بالأوقاف مثل ثقافة المجتمع بالنسبة للأوقاف، وأيضاً مدى توفر ثقافة وقناعة الموظفين والمنتفعين بالأوقاف بأهمية استثماره أو الانتفاع به، وماهية الصيغ الاستثمارية وأنواعها، ومن المفروض أن تواكب ليبيا التطور الحاصل في استثمار الوقف كما هو موجود في دول سبقتنا في مجال الوقف وعدم الاقتصار مثلاً على صيغتي الإجارة أو الإيجاريتين فحسب، حيث إن الوقف من طبيعته يتحسس مشاكل الناس، مثال على الدول التي من المناسب الاستفادة منها والتي تشهد تقدماً في هذا المجال الكويت والسودان وماليزيا فما المانع من الاستفادة من هذه التجارب المهمة في تطوير

المعوقات المرتبطة باستثمار الوقف، وبدايتها المعوقات السياسية وتتمثل في عدم الاستقرار الإداري للأوقاف بليبيا، وعدم رغبة الدولة في إقامة مشروعات الاستثمار للوقف، وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالاستثمار، وعدم البحث عن الصيغ الاستثمارية من غير الإيجار وعدم تقديم الدولة ضمانات كافية للمستثمرين، ثم المعوقات القانونية التي تتمثل في عدم الاستقرار القانوني والتشريعي في ليبيا، والاعتماد على القرارات بدل القوانين، وعدم صدور قانون خاص بالاستثمار في الأوقاف، تم المركزية التي تعاني منها إدارة الأوقاف، ثم كانت هناك المعوقات البيئية والاجتماعية وتتمثل في عدم وعي المجتمع بمهية الأوقاف وأهميته، وأحكامه، وأخيراً تبين أن المعوقات الاستثمارية تمثل في استخدام بعض الصيغ الاستثمارية طويلة الأجل في السابق مثل الخلو والحكر والإجارتين، والاستبدال، وعدم تبني الصيغ المناسبة الجديدة، وشح الوثائق الدالة على الوقف، وعدم وجود شهادة عقارية لنسبة كبيرة من أعيان الأوقاف مما سبب عزوف المستثمرين، لعدم وجود ضمان، وبالتالي يتضح الحاجة الماسة لمعالجة هذه المشاكل والمعوقات سواء المرتبطة بإدارة الوقف بصفة عامة أو تلك المرتبطة باستثمار مال الوقف في ليبيا من خلال المحددات الرئاسية المتحكمة بها.

3. من حيث تفعيل دور إدارة واستثمار الأوقاف في ليبيا لكي تقوم بمهامها بشكل أفضل تبين أن ذلك يتم بمراعاة محددات معينة تحكمه ويجب الاهتمام بها أولها المحدد السياسي المتمثل في النظام السياسي الذي كان له دور سلبي في أغلب الأحيان فقد سبب في إهمال الوقف، بينما كان له بعض الإيجابيات، ثم يبرز المحدد القانوني ورغم ما صدر منها فإن القوانين والتشريعات واللوائح غير كافية حيث إن الوقف بحاجة مستمرة للمتابعة القانونية، أما المحدد الثالث فهو المحدد الإداري من خلال الإدارة المركزية حيث انصبغت إدارة الوقف في ليبيا بمركزية إدارية، والتي أثرت سلباً في إدارته، ثم كان دور عنصر التدريب الوظيفي ونقص الخبرة الدور الكبير أيضاً في ذلك وخاصة لمن يتولون القيام بمهام إدارة الوقف في ليبيا، ثم يبرز دور الرقابة الإدارية على الوقف وتقصيرها في مهامها سواء الداخلية أو الخارجية، ثم كان المحدد الاجتماعي والثقافي حيث ساهم الوقف في دعم المجتمع في جميع مناحي الحياة ونجد من خلال هذا المحدد إن الناس في ليبيا لا يثقون في الأوقاف لعلمهم أن المسؤولين عنها غير أكفاء للحفاظ عليها، وكذلك تدني ثقافة المجتمع والعاملين والمستفيدين نحو الوقف، والمحدد الأخير هو محدد الصيغ

- التي نتجت عن تبعيتها للوزارة، ويحقق الكفاءة المطلوبة بالهيئة والتركيز على عملها وهو إدارة واستثمار الأوقاف، وذلك لان الوزارة تهتم بالإدارات الأخرى على حساب الأوقاف.
3. في الجانب السياسي أن تعمل الدولة معالجة التعدي على أعيان الوقف ووقفه باعتبار ذلك مضرًا بالوقف ومدعاة لنفور الناس من الدخول في الوقف سواء من واقفين أو مستثمرين وكذلك ضرورة إعادة الأعيان التي أخذتها الدولة إلى ملكية الوقف والتعويض على فترة الاستفادة الماضية.
4. العمل على إصدار قوانين جديدة مطورة لما صدر سابقاً حيث لم يصدر قانون شامل للوقف في ليبيا منذ سنة 1972م، كما يجب أن تراعي القوانين مصلحة الوقف وتطويره بالصيغ الاستثمارية الجديدة وعدم الاكتفاء بصيغة الإجارة، وأن تعمل على استقلاليته ولو بالتدرج باعتبار أن هذا هو أفضل الخيارات الإدارية للوقف كما برهنت تحارب العالم الإسلامي.
5. أن تعمل الدولة على إيقاف عقود المنتفعين من أملاك الوقف المتقاعسين عن دفع ما عليهم وأن تقوم بالتعاون مع هيئة الأوقاف باستغلال مال البديل والمال المتحصل عليه من مختلف أعيان الوقف بالوسائل الأخرى كالتعويض أو الديون المحصلة أو البيع للأصول المتهاكة في مشاريع تخدم الأوقاف في ليبيا.
6. العمل على إنجاز الهيكل التنظيمي المتأخر وكذلك إنجاز ملاك وظيفي جديد ومناسب يراعي صلاحيات ومسؤوليات الهيئة العامة للأوقاف بعد إعادة تنظيمها بموجب القرار رقم 10 لسنة 2016م بشأن إنشاء هيئات مستقلة بالدولة ومنها هيئة الأوقاف في ليبيا.
7. العمل على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري لأملاك الوقف لأنها من أهم الخطوات التي لها دور في تشجيع المستثمرين على الانخراط والدخول في الاستثمار الوقفي، كما يجب إصدار قانون خاص بالاستثمار في الوقف من شأنه أن ينظمه ويكون مراعيًا لمصلحة كل الأطراف وخاصة مصلحة الوقف.
8. العمل على توفير الكفاءات والخبرات الإدارية والمالية في إدارة الأوقاف والاستعانة حتى من خارج الأوقاف بالمختصين في هذا الجانب مثل أساتذة وخبراء الاقتصاد الإسلامي من أجل تطوير وإيجاد حلول لمشاكل الوقف، والمحافظة عليه، وتدريب الموظفين، وتوعية الناس، وغير ذلك من الأدوار التي يمكن أن يلعبها هؤلاء المختصون.

9. تفعيل وظيفة الرقابة على الوقف وضرورة وجود جسم لرقابة شرعية في إدارة الأوقاف في ليبيا حتى تقوم بدور حيوي ومهم في مجال الفتوى، وفي مجال المراقبة الشرعية، وفي مجال تطوير الصيغ الاستثمارية، وغير ذلك من المجالات، بالإضافة لاستمرار وسائل الرقابة الحالية.
10. إعادة صلاحيات النظار في الوقف، وتشجيع الوقف الذري وتنظيمه، كذلك العمل على تشجيع الوقف المؤقت لأن بعض الناس يمكنهم إيقاف جزء من مالهم أو ممتلكاتهم لسنوات معدودة ومحددة، ولا يرغبون في الوقف المؤبد، فيلزم فتح المجال للنوعين معاً.
11. إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الوقف النقدي وكذلك الوقف في الأسهم، وتوعية الناس بالدخول في مجالات الوقف المختلفة وعدم قصره على المساجد والزوايا ونحوها، بل يجب أن يتطور وفق تطور حياة الناس ومصالحهم وحاجاتهم.
12. ضرورة تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2010م بشأن تأجير أعيان الوقف بأجرة المثل، وفرض القوانين والتشريعات الملزمة بالتعويض عن مدد الانتفاع التي لم تدفع للوقف من إيجارة وغيرها، سواء من الجهات العامة كالشركات وعلى رأسها شركة الكهرباء المستفيد الأكبر، وسواء من الأفراد.
13. العمل على حصر وتقييم الأملاك الوقفية في ليبيا بصفة عامة، والقيام بحصر جديد للديون، وخاصة حصر الأملاك والأعيان المتهاككة من أجل التصرف فيها ومعالجتها بالطرق القانونية والشرعية المناسبة.
14. أن تعمل وزارة التعليم على تخصيص جزء من مقرراتها ومناهجها الدراسية حول الوقف، وكذلك أن عمل بقية الوزارات كوزارة الثقافة على دعم الوقف بنشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين الناس والتكافل الاجتماعي بوسيلة الوقف.
15. إجراء المزيد من الدراسات عن الوقف في ليبيا والاستفادة من تجارب الدول الإسلامية المتقدمة في الوقف وعلى رأسها إندونيسيا والكويت، من خلال التعاون التعليمي والدورات والندوات المشتركة، وتبادل الخبرات الوظيفية وغير ذلك.

- جديدي(ال)، عمر بن عبد الكريم، العرف والعمل في المذهب المالكي، مفهومها لدي علماء المغرب. المغرب: مطبعة فضالة، 1982.
- حبشي(ال)، مُجَّد مصطفى شحاته، الأحوال الشخصية في الولاية والوصية والوقف. القاهرة: مطبعة دار التأليف، 1976.
- حجازي(ال)، شرف الدين أبي النجا موسي بن أحمد، زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق عبد الرحمن علي مُجَّد العسكر. الرياض: دار الوطن للنشر، 1424هـ.
- حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، مجلد 1. الرياض: دار عالم الكتب، 2003.
- خوجة، عز الدين مُجَّد، المضاربة الشرعية، مراجعة، عبد الستار أبو غدة. مجهول مكان النشر: دله البركة إدارة التطوير والبحوث، 1993.
- خياط(ال)، عبد العزيز، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج 2، ط 4. السعودية: دار البشير، 1994.
- دميري(ال)، بهرام بن عبد الله، الشامل في مذهب الإمام مالك، صححه: أحمد عبد الكريم جيب، باب الاجارة، ج 2. مصر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 2008.
- الرصاع، أبو عبد الله مُجَّد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفه، تحقيق مُجَّد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، ج 2. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993.
- زحيلي(ال)، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 8. دمشق: دار القمر، 1985.
- زحيلي(ال)، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة. دمشق: دار الفكر، 2002.
- زحيلي(ال)، وهبة، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، ط 2. دمشق: دار الفكر، 1996.
- زرqa (ال)، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي. دمشق: دار العلم، 1999.
- سالوس(ال)، علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ط 7. مصر: مكتبة دار القرآن، قطر: دار الثقافة، بدون سنة نشر.
- سنهوري(ال)، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الانتفاع بالشئ، الإيجار والعارى، مجلد 2، ج 6، لبنان: دار التراث العربي، مجهول سنة النشر.
- شافعي(ال)، ابن حجر الهيتمي، حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج، ج 6. مصر: مطبعة مصطفى مُجَّد، مجهول سنة النشر.

- شربيني(ال)، شمس الدين مُجَّد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج 3. بيروت: دار الكتب العلمية، 2000.
- شعبان، زكي الدين، الغندور، أحمد، أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية. الكويت: مكتبة الفلاح، 1984.
- عبدة، أحمد إدريس، فقه المعاملات على مذهب الامام مالك: مع مقارنة بالمذهب الأخرى. الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر، مجهول السنة..
- غرناطي(ال)، مُجَّد بن أحمد، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، حققه: ماجد الحموي. بيروت: دار ابن حزم، 2013.
- غرياني(ال)، الصادق عبد الرحمن، فتاوي المعاملات الشائعة، ط2. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر، 2003.
- غرياني(ال)، الصادق عبد الرحمن، مدونة الفقه المالكي وأدلته. بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر، 2002.
- غزالي(ال)، أبو حامد مُجَّد، إحياء علوم الدين، ج2. مصر: مكتبة ومطبعة كرياض قوترا، مجهول سنة النشر.
- غنانيم(ال)، قدافي عزات، العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي. الأردن: دار النفائس، 2008.
- قرطبي(ال)، أبي عبد الله، مُجَّد بن أحمد بن أبي بكر، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق، عبد الله التركي، ج8. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006.
- قره داغي(ال)، علي محي الدين، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. بيروت: دار البشائر الإسلامية، 2001.
- كبي(ال)، سعد الدين مُجَّد، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام. بيروت: الكتب الإسلامي، 2002.
- 3. الكتب عن الوقف**
- أبا الخيل، سليمان بن عبد الله، الوقف في الشريعة الإسلامية. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2008.
- أبو غدة، عبد الستار، حسين شحاته، الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف، ط2. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2014.
- الارناؤوط، مُجَّد، الوقف في العالم الإسلامي ما بين الماضي والحاضر. لبنان: جداول للنشر، 2011.
- الأشقر، أسامة عمر، مؤسسات وقفية رائدة: تجارب ودروس، ط2. عمان: دار النفائس، 2018.

- الأشقر، مُحمَّد سليمان، عقد الاستصناع، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. الأردن: دار النفائس، 1998.
- الأشقر، مُحمَّد سليمان، بدل الخلو، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة. الأردن: دار النفائس، 1998.
- أنس ليفاكوفيش، تأصيل ريع الوقف. الكويت: الأمانة العامة للوقاف، 2016.
- بدران(ال)، كاسب بن عبد الكريم، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، ط2. السعودية: جامعة الملك فيصل، 1984.
- بن بية، عبد الله بن الشيخ، إعمال المصلحة في الوقف. جدة: مؤسسة الريان، 2005.
- بن قاسم، عبد العزيز بن إبراهيم، نبذة في الأوقاف مع بعض النماذج الخاصة بها. الرياض: دار صالة الحاضر، 2010.
- بنعبد الله، مُحمَّد بن عبد العزيز، الوقف في الفكر الإسلامي، ج1. المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز، دور الوقف في خدمة التنمية البشرية عبر العصور، الإصدار 19. السعودية: مركز الإنتاج الإعلامي، 1429هـ.
- جمال(ال)، مُحمَّد محمود، إدارة واستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي وأنظمة الإدارة العامة للأوقاف القطرية. قطر: الإدارة العامة للأوقاف، مجهول سنة النشر.
- جمال(ال)، أحمد مُحمَّد، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة. القاهرة: دار السلام، 2007.
- دنيا، شوقي أحمد، مجالات وفقية مستجدة، وقف المنافع والحقوق. السعودية: جامعة أم القرى، 1427هـ.
- ريسوني(ال)، أحمد، الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده. مصر: دار الكلمة للنشر والتوزيع، 2014.
- زيددي(ال)، الهمامي مفتاح، الوقف في ولاية طرابلس دراسة وثائقية. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2010.
- زرقا (ال)، مصطفى أحمد، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات المالية المعاصرة. السعودية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1995.
- زريقي(ال)، جمعة محمود، في مباحث الوقف الإسلامي، أوقاف مدينة طرابلس ودورها في ترسيخ الحضارة الإسلامية. بنغازي: دار الكتب الوطنية، 2007.
- زريقي(ال)، جمعة محمود، في مباحث الوقف الإسلامي، نظام الوقف في ليبيا بعد انتهاء مرحلة الاستعمار الإيطالي، بنغازي: دار الكتب الوطنية، 2007.

- سرحان(ال)، عبد الله بن ناصر، الأوقاف والمجتمع، ط3. الرياض: مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، 2018.
- شيفح(ال)، خالد بن علي، النوازل في الأوقاف. الرياض، السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2012.
- صالح(ال)، محمد بن أحمد، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2001.
- صبري، عكرمة سعيد، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق. الأردن: دار النفائس، 2011.
- صلاحت(ال)، سامي محمد، الإعلام الوقفي، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2006.
- عبد الباقي، إبراهيم محمود، دور الوقف في تنمية المجتمع المدني. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2006.
- عبيدي(ال)، إبراهيم عبد اللطيف، استبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونية. دبي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 2009.
- عثمان(ال)، عبد الرحمن بن إبراهيم، أموال الوقف ومصرفه. السعودية: وزارة شؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1428هـ.
- عكش(ال)، محمد أحمد، التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، دراسة حالة السعودية. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2006.
- عمر(ال)، فواد عبد الله، إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، ط2. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2011.
- عيوني(ال)، عبد الكريم، إسهام الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية والثقافية بالمغرب، خلال القرن العشرين. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2011.
- غانم، إبراهيم البيومي، الأوقاف والسياسة ف مصر. القاهرة: دار الشروق، 1998.
- فضلي(ال)، داهي، تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دولة الكويت. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف أبريل، 1998.
- قحف، منذر، الوقف الإسلامي، تطوره، إدارته، تنميته. دمشق: دار الفكر، 2000.
- قصار(ال)، عبد العزيز خليفة، الوقف وأثره في تنمية الاقتصاد الإسلامي. دبي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 2017.
- محمد تنتوش، تقييم أداء وزارة الأوقاف في ليبيا. طرابلس: المنظمة الليبية لسياسات والاستراتيجيات، مايو، 2017.
- مشيقع(ال)، خالد بن علي، النوازل في الأوقاف. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2012.
- مصري(ال)، رفيق يونس، الأوقاف فقهاً واقتصاداً. دمشق: دار المكتبي، 1999.

- زريقي(ال)، جمعة محمود، "تعمير أعيان الوقف واختلاف وسائله قديما وحديثا: مع دراسة حالة من ليبيا"، منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس (الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، 2012).
- سانو، قطب مصطفى، "وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة"، في منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2009.
- شبير، محمد عثمان، حسن يشو، "الاستبدال في الوقف أحكام أموال البدل"، في منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، تحرير، الأمانة العامة للأوقاف (الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، 2011).
- شحاته، حسين حسين، "الضوابط الشرعية الأسس المحاسبية لصيغ استثمار الوقف"، في ندوة قضايا الوقف الفقهية الأول، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2004.
- شعيب(ال)، خالد عب الله، "استثمار أموال الوقف"، في منتدى قضايا الوقف الفقهية الأولى، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف الكويت، الطبعة الأولى، 2004.
- صلاحات(ال)، سامي حسن، "تمويل الأوقاف عن طريق الاكتتاب العام"، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، أبريل، 2017.
- علي محي الدين، "وسائل اعمار اعيان الأوقاف"، منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، 2001.
- عمار(ال)، عبد الله بن موسي، "استثمار أموال الوقف، في منتدى قضايا الوقف الفقهية الاول، تحرير الأمانة العامة للأوقاف الكويت، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، 2003.
- عنزي(ال)، عصام خلف، "ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف"، في منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2012.
- قره داغي(ال)، علي محي الدين، "الذمة المالية للوقف وأثرها، دراسة فقهية مقارنة"، منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، 2015.
- قصار(ال)، عبد العزيز خليفة، "وقف النقود والأوراق المالية وتطبيقاته المعاصرة"، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الكويت، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الثانية، 2009.
- محادي(ال)، فيصل بن سليم، "الاستبدال في الوقف أحكام أموال البدل"، في منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، تحرير، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، 2011.
- منصوري، كمال، "ولاية الدولة في الرقابة على الأوقاف والرقابة الشرعية في المؤسسة الوقفية"، في منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2012.

دماغ(ال)، زياد، " دور الصكوك الإسلامية في دعم قطاع الوقف الإسلامي"، في مؤتمر عالمي عن: قوانين الأوقاف وإدارتها: وقائع وتطلعات، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا: أكتوبر 2009.

دهاس(ال)، فواز بن علي، " الوقف مكانته وأهميته الحضارية"، في ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1420هـ.

زحيلي(ال)، محمد مصطفى، استثمار أموال الوقف، في المؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي والمجتمع الدولي، الشارقة، إبريل 2005.

زيادي، أسماء بن، خلوفي، عائشة، "المؤسسة الوقفية كآلية معاصرة في تحقيق التنمية الاقتصادية"، ضمن المؤتمر الدولي العلمي الثاني، الجزائر: جامعة سعد دحلب، 2013.

زيدان، محمد، سعاد الميلودي، مداخل استثمار أموال الوقف، في المؤتمر الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة، الجزائر: جامعة سعد دحلب، 2013.

سكينة محمد الحسن، الصيغ التمويلية المستحدثة وتطوير الوقف، بحث مقدم الي المؤتمر العلمي العالمي الخامس، الوقف الإسلامي التحديات واستشراف المستقبل، السودان: يوليو، 2017.

شرون، عزالدين، نورالدين بوالكور، " دور المؤسسات الوقفية في تنمية المجتمع - واقع الأعيان الوقفية في الجزائر" في الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية، آليات ترشيد الصناعة المالية الإسلامية، الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بسكيكدة، ديسمبر 2013.

صلاحات(ال)، سامي، "تطوير الأسس الإدارية للمؤسسات الوقفية في دولة الإمارات"، في بحث فائز بجائزة العويس للدارسات والابتكار العلمي، الدورة الخامسة عشر، 2005.

صلاحات(ال)، سامي، "الاستثمار الوقفي تفعيل صيغ التمويل لمؤسسة الأوقاف"، دراسة حصلت على جائزة العويس للدارسات والابتكار العلمي، الدورة 16، 2006.

ضميرية، جمعة، استثمار أموال الأوقاف على التعليم وأساليب أدايتها، ورقة مقدمة لمؤتمر إثر الوقف الإسلامي في النهضة التعليمية ضمن المؤتمر المنعقد بجامعة الشارقة، دولة الإمارات، مايو 2011.

ضميرية، عثمان جمعة، "استثمار أموال الأوقاف على التعليم وأساليب إدارتها" في مؤتمر أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الشارقة: جامعة الشارقة، 2011.

طابله، مصطفى الصادق، التمويل الإسلامي الاجتماعي في ليبيا الواقع وأفاق التطوير، في ورشة عمل التي تنظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، حول التمويل الإسلامي الاجتماعي لدول المغرب العربي، المنعقد بتونس بتاريخ 2017/06/10.

- عبد السلام، مصطفى محمود، "آلية تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامية"، بحث مقدم لمؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول (دبي، يونيو 2009).
- علي(ال)، محمد نور، الأسهم الوقفية والتأصيل المعرفي والتاريخي للوقف ومراحل تطوره، بحث مقدم الي المؤتمر العلمي العالمي الخامس، الوقف الإسلامي التحديات واستشراف المستقبل، السودان: يوليو، 2017.
- عليون(ال)، راشد أحمد، الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقف، في اللقاء السنوي الثامن للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، مارس 2008.
- عمر (ال)، فؤاد عبد الله، "دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف الإدارة والاستثمار"، في ندوة الوقف في تونس، الواقع وبناء المستقبل، تونس: فبراير 2012.
- غانم، هاجرة؛ باوي، أسماء حد، " دور الوقف في تحريك عجلة التنمية، في المؤتمر الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة، الجزائر: جامعة سعد دحلب.
- قحف، منذر، "الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصة لدول العربية شرق المتوسط"، في الندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، بيروت: 2001.
- لشلاش، عائشة، قدوري، هودة، "أهمية الزكاة والوقف في تحقيق التنمية الاقتصادية: في الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، الجزائر: جامعة قلمة، ديسمبر، 2012.
- مرغاد، لخضر؛ منصوري كمال، "التمويل بالوقف: بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحلية"، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول: تمويل التنمية الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر 2006.
- مزوغني(ال)، المبروك بلعيد، "التجارب الوقفية وتوثيقها في الجماهيرية"، في ندوة التجارب الوقفية لدول المغرب العربي، الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
- مزيني(ال)، إبراهيم بن محمد، "الوقف وأثره في تشيد بنية الحضارة الإسلامية"، في ندوة المكتبات الوقفية في السعودية، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، 1420هـ
- مهيدب(ال)، خالد بن هدوب، "أثر الوقف في تحقيق التنمية المستدامة"، في الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، الجزائر: جامعة قلمة، ديسمبر 2012.
- ميمان(ال)، ناصر عبد الله، النوازل الوقفية، السعودية: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1430هـ.
- نصر، مطهر سيف أحمد، "التنظيم المالي والإداري الأمثل لاستنهاض الوقف الإسلامي المعاصر" في مؤتمر أثر الوقف الإسلامي في النهضة العلمية، الشارقة: جامعة الشارقة، 2011.

- خالد(ال)، مُجَّد عبد الرحيم، أحكام الوقف على الذرية في الشريعة الإسلامية، المجلد الثاني، السعودية: مكتبة الملك فهد الوطنية، 1996.
- راشدة(ال)، ماجد أحمد، "الوقف الذري للأسهم في الشركات المساهمة العامة"، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارة العربية المتحدة، العدد 57، السنة 28، يناير، 2014م.
- ساعدي(ال)، عمر مفتاح، "الاستثمار في ليبيا والتنمية المستدامة"، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي المشترك، 2014.
- سعد(ال)، أحمد مُجَّد، "الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف والاقتصاد مدخل نظري"، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد 17، العدد 8، 2002.
- سلمان، قتيبة كريم، "متولي الوقف بين التشريعية والقانون"، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 26.
- شبيلي(ال)، يوسف بن عبد الله، "التأخير التمويلي دراسة فقهية مقارنة"، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 11، محرم، 2011.
- حيدر، مصطفى مُجَّد، مشروعية استثمار أموال الوقف، "مجلة كلية العلوم الإسلامية" العدد السابع: المجلد الرابع، 2010.
- شرون، عزالدين، "أساليب استثمار الوقف في الجزائر"، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية، العدد الثامن، أغسطس، 2014.
- صالح، صالح "الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 7، الجزائر: جامعة مُجَّد خيضر، فبراير، 2005.
- صلاحيات(ال)، سامي مُجَّد حسين، "الجودة الوقفية": دراسة في معايير الجودة الناجحة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 28، الكويت: جامعة الكويت، يونيو 2013.
- صلاحيات(ال)، سامي مُجَّد حسين، "مركزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية"، مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 2، مجلد 18، 2005.
- صلاحيات(ال)، سامي مُجَّد حسين، "مركزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية، مجلة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، العدد 2، المجلد 8، 2005.
- صلاحيات(ال)، سامي، "مركزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية" مجلة جامعة الملك عبد العزيز، العدد 2، مجلد 18، السعودية، 2005.
- طابله، مصطفى، "الإشكاليات الفقهية لأنظمة الوقف في ليبيا (القانون رقم 1972/124م نموذجاً)"، مجلة السراج المنير، العدد 2، رابطة علماء ليبيا، أبريل 2016.

- . http://waqef.com.sa/site_books_show.php?show=292
عليون(ال)، راشد بن أحمد، "الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقف"، اللقاء السنوي للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية، جمعية البر بالمنطقة الشرقية، <https://tslibrary.org/5342>
عبيدي(ال)، إبراهيم، ثقافة المجتمع، موقع موضوع، [/http://mawdoo3.com](http://mawdoo3.com)
قحف، مندر، "الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر"،
http://monzer.kahf.com/books/arabic/al-waqf_wa_tanmiyatuh_part1.pdf
قاسم، أمجد، الثقافة مفهوم وخصائصها وعناصرها، موقع آفاق عليمية وتربوية،
[/http://al3loom.com](http://al3loom.com)
صالح بشير المزوغى، ملكية الأراضي في ليبيا منذ العهد العثماني الي وقتنا هذا.
<http://tamimi.own0.com/t22453-topic>
عاشراً: الدراسات بغير اللغة العربية
Abdurrahman Kasdi, Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, Volume 2, No.1, Juni 2014, hlm 34-48.
Bent Flyubjerg, case study in norman denzin and yvnnas Lincoln, *the sage hanabook of qualitative research*. 4th ed,(CA,Thousand oaks,2011) 301.
John W. creswell, *research design. qualitative, quantitate and mixed methods approaches*, 2th, ed, (London, SAGE, 2003), 15.
Kathleen M. Eisenhardt, " Building Theories from Case Study Research", *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 4(oct,1989), 534,546.
Louis conhen, Lawrence Manirn & Keitn Morrison, *research methods in education, sixth edition*, (new York:Routhedge ,2007), 253
Michael E. Patterson and Daniel R. Williams, collecting and analyzing qualitative data, (champaign ,sagamare publishing,
Mohammed saleh ayyash ،Murabaha sale ،IRTIK Knowledge review، Decemer 2011،4.
Proceedings of International Conference on Cash Waqf (Iccw 2015) -May 2015), Sepang, Malaysi ،4.
Robert K , Yin, Case Study research ,design and method, 4th ed, (California, SAGE,2009), 18.

